



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

# MATERI PELATIHAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PEMERINTAH DAERAH



# Alur Materi Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah Daerah

	Bab 1	Bab 2	Bab 3	Bab 4
Tema	<b>Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data</b>	<b>Profil dan Platform Rapor Pendidikan</b>	<b>Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah Daerah</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami kebijakan Merdeka Belajar</li><li>• Memahami konsep Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari Merdeka Belajar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami definisi, kerangka dan struktur Profil Pendidikan</li><li>• Memahami indikator dalam Profil Pendidikan</li><li>• Mampu mengakses dan menggunakan platform Rapor Pendidikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan Profil Pendidikan</li><li>• Menetapkan solusi penyelesaian akar masalah</li><li>• Memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan dan anggaran</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan</li></ul>

# Bab 1: Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data

Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

**01**

**Memahami kebijakan Merdeka Belajar**

**02**

**Memahami konsep Perencanaan Berbasis Data sebagai bagian dari Merdeka Belajar**

# Kemdikbudristek telah menetapkan **Visi Pendidikan Indonesia** sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan

“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.”



# Untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, dikeluarkan kebijakan Merdeka Belajar bagi tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia

## Pendidikan Berkualitas

Memastikan peserta didik mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter



**Fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter**

## Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan (sulit mendapat akses pendidikan) dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yg berkualitas.



**Intervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan**



# Episode Merdeka Belajar Hingga Saat Ini



EPISODE 1  
MERDEKA BELAJAR



EPISODE 2  
KAMPUS MERDEKA



EPISODE 3  
PERUBAHAN  
MEKANISME BOS



EPISODE 4  
PROGRAM ORGANISASI  
PENGGERAK



EPISODE 5  
PROGRAM GURU  
PENGGERAK



EPISODE 6  
TRANSFORMASI DANA  
PEMERINTAH UNTUK  
PENDIDIKAN TINGGI



EPISODE 7 PROGRAM  
SEKOLAH PENGGERAK



EPISODE 8 SMK  
PUSAT  
KEUNGGULAN



EPISODE 9  
KIP KULIAH MERDEKA



EPISODE 10 PERLUASAN  
PROGRAM BEASISWA  
LPDP



EPISODE 11 KAMPUS  
MERDEKA VOKASI



EPISODE 12  
SEKOLAH AMAN  
BERBELANJA BERSAMA  
*SIPLAH*



EPISODE 13  
MERDEKA BERBUDAYA  
DENGAN KANAL  
INDONESIANA



EPISODE 14 KAMPUS  
MERDEKA DARI  
KEKERASAN  
SEKSUAL



EPISODE 15 KURIKULUM  
MERDEKA DAN  
PLATFORM MERDEKA  
MENGAJAR



EPISODE 16  
AKSELERASI DAN  
PENINGKATAN DANA PAUD  
DAN PENDIDIKAN SETARA



EPISODE 17  
REVITALISASI  
BAHASA DAERAH



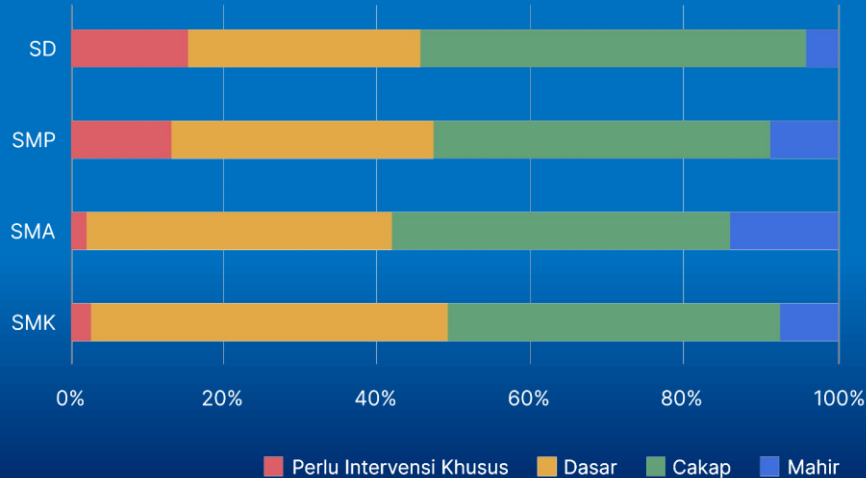
EPISODE 18  
MERDEKA BERBUDAYA  
DENGAN DANA  
INDONESIANA



EPISODE 19  
RAPORT PENDIDIKAN  
INDONESIA

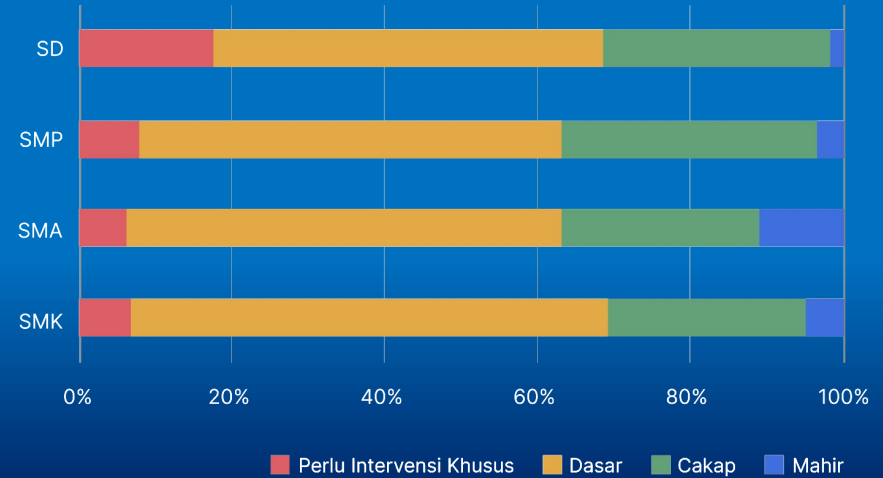
# Terdapat isu kompetensi peserta didik di Indonesia dengan perbedaan capaian per jenjang

Capaian Kompetensi Literasi per Jenjang



**1 dari 2 peserta didik**  
belum mencapai kompetensi  
minimum literasi<sup>1</sup>

Capaian Kompetensi Numerasi per Jenjang



**2 dari 3 peserta didik**  
belum mencapai kompetensi  
minimum numerasi<sup>1</sup>

1. Hasil AKM konsisten di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/ sederajat)

# Kompetensi literasi dan numerasi yang rendah berpotensi berakibat buruk pada keberlangsungan masyarakat, antara lain:



Kesulitan untuk peserta didik melanjutkan belajar di tingkat pendidikan selanjutnya, karena literasi dan numerasi adalah fondasi kemampuan belajar



Daya saing rendah di era berbasis teknologi dan digital terutama di kancah internasional



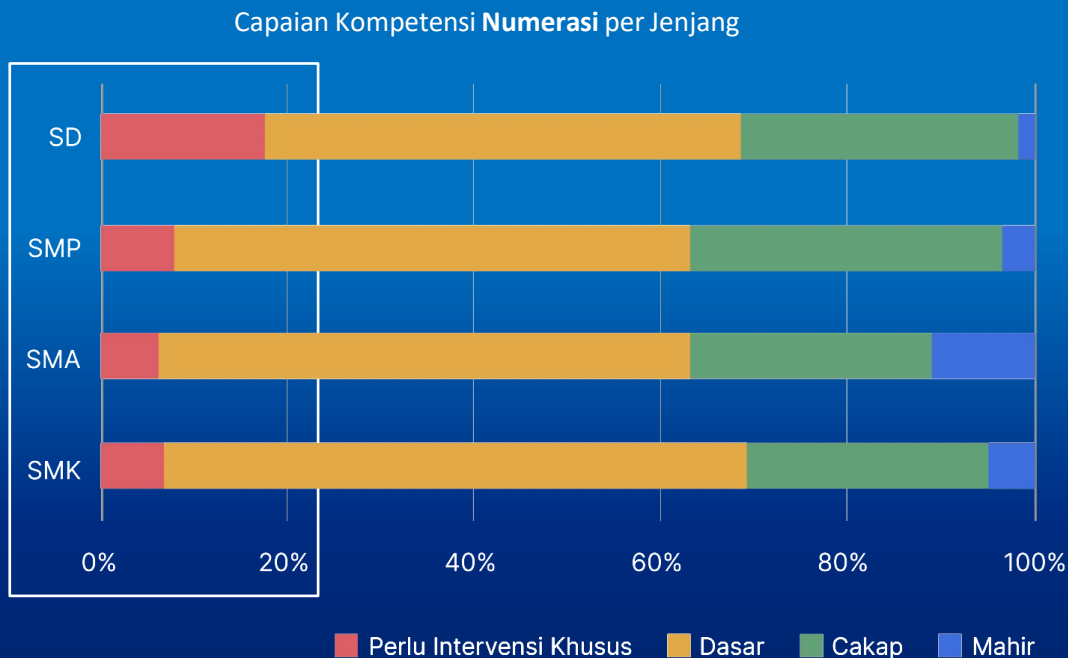
Kesadaran rendah terhadap **hoax** yang disebar di masyarakat



# Jenjang pendidikan SD/MI/ sederajat adalah jenjang yang memiliki proporsi satuan pendidikan "Perlu Intervensi Khusus" terbanyak untuk kompetensi numerasi

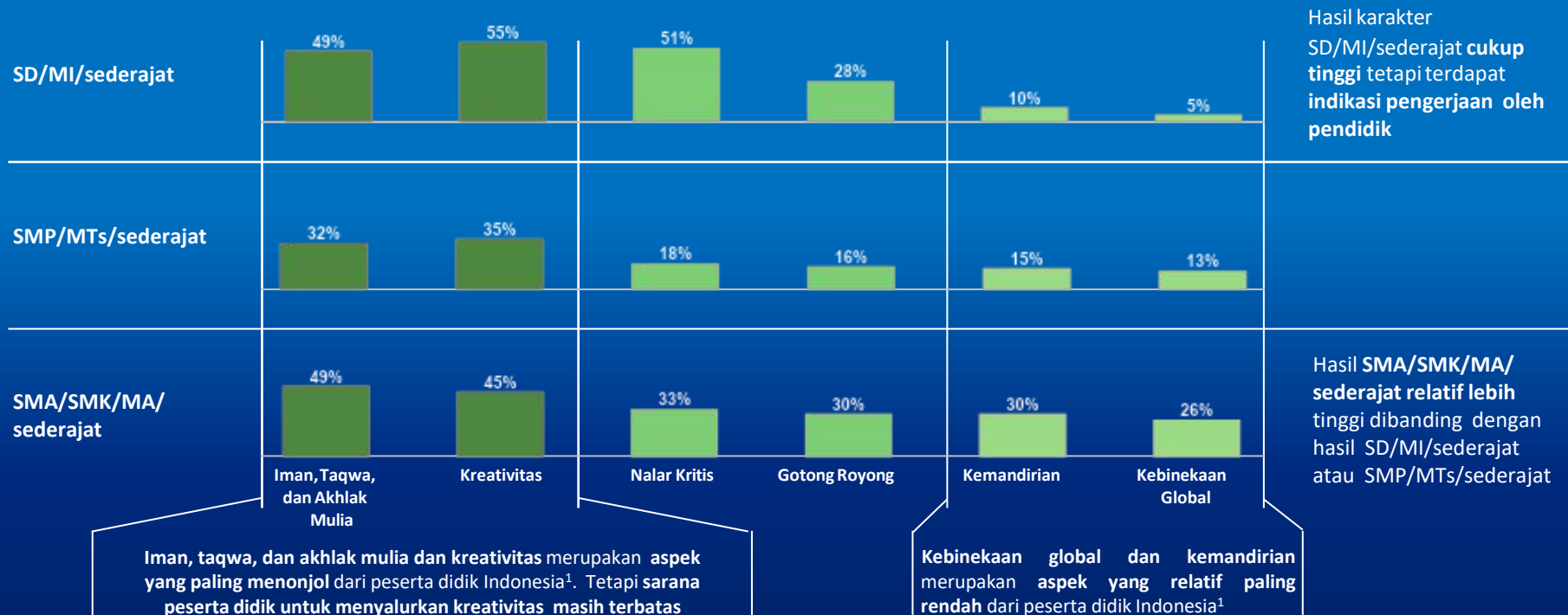
18% satuan pendidikan di Jenjang SD/MI/ sederajat berada pada kategori **Perlu Intervensi Khusus**, jauh lebih tinggi dibandingkan jenjang lain seperti SMP (8%), SMA (6%), dan SMK (7%)

Oleh karena itu penting untuk mengimplementasikan program-program Kemdikbudristek seperti Kurikulum Merdeka, Kurikulum Darurat, Modul Literasi dan Numerasi, serta Kampus Mengajar yang mendukung pemulihan pembelajaran terutama di jenjang SD/MI/ sederajat



# Iman, taqwa, dan akhlak mulia dan kreativitas merupakan karakter yang paling menonjol dari peserta didik Indonesia

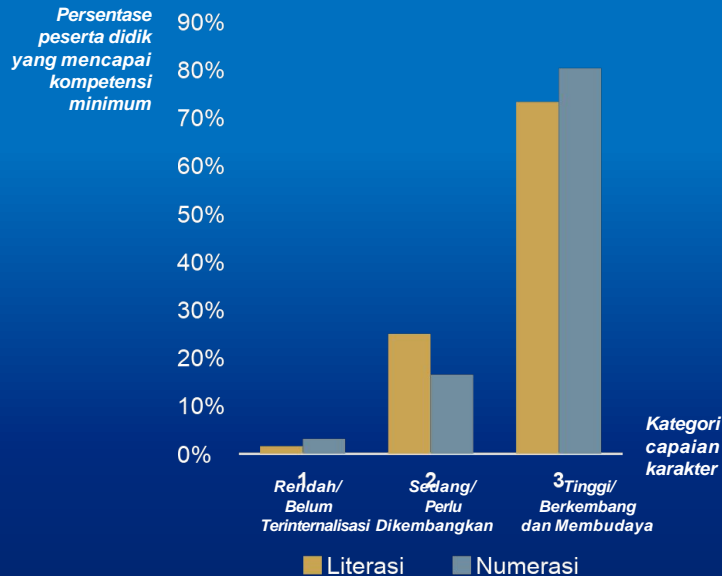
Persentase peserta didik yang memenuhi profil Pelajar Pancasila (%)



1. Secara relatif dibanding dengan sub-aspek lain

# Indeks karakter berkorelasi positif dengan kemampuan literasi dan numerasi, menunjukkan pentingnya Kurikulum Merdeka yang memiliki pendekatan lebih holistik

*Semakin baik karakter, maka semakin baik capaian literasi dan numerasi*



AN memberi gambaran komprehensif tentang kualitas pendidikan di Indonesia



Terdapat korelasi antara kompetensi literasi-numerasi dan karakter peserta didik – menunjukkan pentingnya kurikulum dan pembelajaran yang holistik



Kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan penting untuk diperhatikan – lebih penting dari aspek sarana-prasarana dan administratif

# Survei Lingkungan Belajar mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik, seperti kualitas pembelajaran, iklim keamanan, dan iklim kebinekaan



Kualitas pembelajaran: tingkat **kualitas interaksi antara pendidik dan peserta didik, dan materi pembelajaran** dalam proses pengajaran dan pembelajaran



Iklim keamanan: tingkat **rasa aman dan kenyamanan peserta didik** di satuan pendidikan dalam hal perasaan aman, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan narkoba di lingkungan satuan pendidikan



Iklim kebinekaan: menyangkut **bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keberagaman** seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya dan mengenai komitmen kebangsaan

# Pendidik Indonesia relatif baik dalam memberikan dukungan afektif pada peserta didik tetapi perlu peningkatan kemampuan manajemen kelas dan aktivasi kognitif

Performa kualitas pembelajaran di satuan pendidikan

## Dukungan afektif

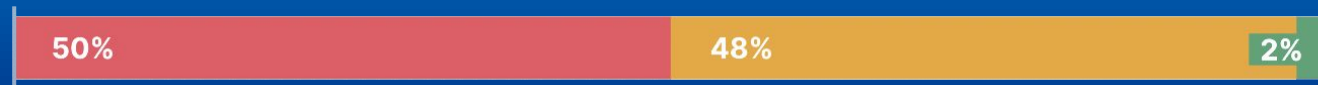
(percaya pada potensi peserta didik, perhatian dan kepedulian pendidik, dan umpan balik yang konstruktif)



- Instruksi yang adaptif dinilai rendah oleh pendidik (1,7%<sup>1</sup>) dan peserta didik (0,9%<sup>1</sup>)

## Manajemen kelas

(disiplin positif dan keteraturan suasana kelas)



- Persepsi peserta didik terhadap panduan pendidik (1,3%) dan aktivitas interaktif (0,1%) relatif lebih rendah dibanding persepsi pendidik terhadap kedua aspek tersebut (19,8% dan 11,1%, secara berurutan)

## Aktivasi kognitif

(pembelajaran yang interaktif dan sesuai kemampuan peserta didik)

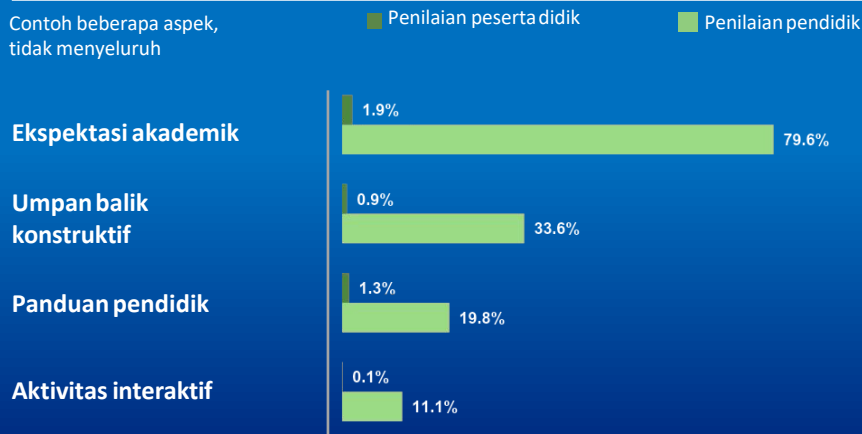


Kurang Sedang Baik

# Terdapat perbedaan besar antara persepsi kualitas pembelajaran antara pendidik dan peserta didik, padahal persepsi peserta didik menunjukkan korelasi lebih tinggi terhadap capaian pembelajaran

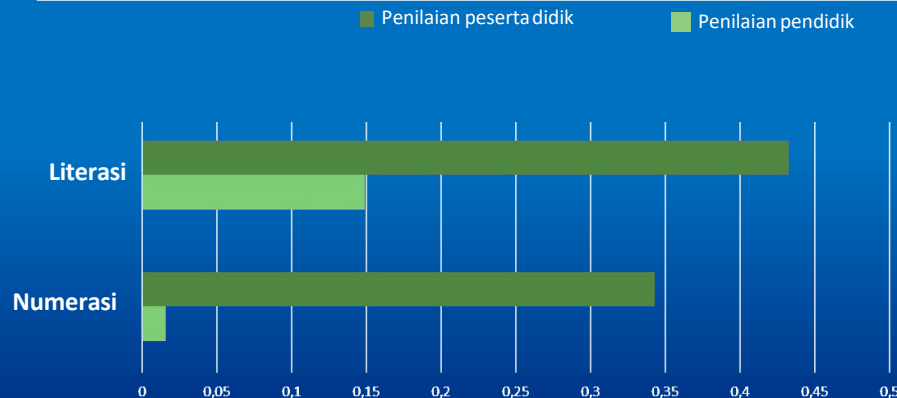
Persentase penilaian baik terhadap aspek kualitas pembelajaran<sup>1</sup> (%)

Contoh beberapa aspek, tidak menyeluruh



Perbedaan persepsi antara pendidik dan peserta didik menunjukkan bahwa **level pembelajaran berorientasi peserta didik masih rendah** di seluruh jenjang pendidikan

Korelasi penilaian pendidik dan peserta didik mengenai kualitas pembelajaran terhadap capaian literasi dan numerasi



Penting untuk **memperhatikan penilaian peserta didik terhadap kualitas pembelajaran**; penilaian peserta didik memiliki korelasi yang lebih besar terhadap capaian kompetensi dibandingkan dengan penilaian pendidik

1. Dari kategori penilaian “kurang”, “sedang”, dan “baik”

# 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan

## 24,4% peserta didik

berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam satu tahun terakhir<sup>1</sup>

1. Data bersumber dari Asesmen Nasional seluruh jenjang (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/ sederajat)



Contoh pertanyaan di dalam survei yang berkaitan dengan insiden perundungan<sup>1</sup>

Selama satu tahun terakhir, seberapa sering kamu memiliki pengalaman-pengalaman berikut ini di sekolah?

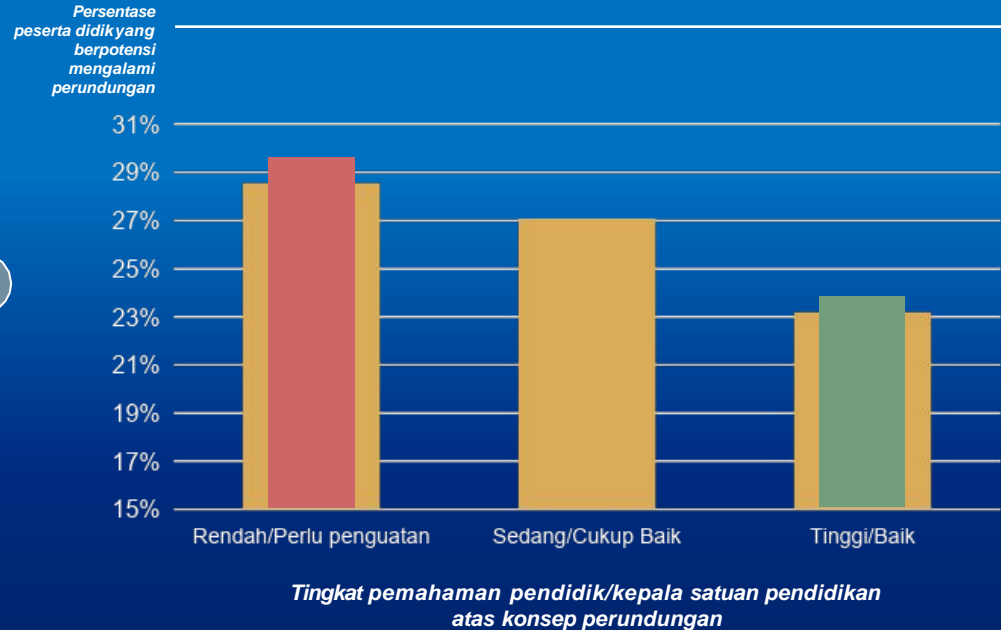
- 1 Saya dipukul atau ditendang atau didorong oleh siswa lain di sekolah
- 2 Saya diancam oleh siswa lain
- 3 Siswa lain mengambil atau merusak barang-barang milikku

# Semakin pendidik/kepala satuan pendidikan paham tentang konsep perundungan, semakin berkurang insiden yang terjadi

Contoh pernyataan dalam survei untuk mengukur pemahaman pendidik/kepala satuan pendidikan tentang perundungan

- 1 Kejadian yang dianggap sebagai *bullying*/perundungan itu biasanya hanya kenakalan yang wajar dilakukan peserta didik
- 2 Satuan pendidikan tidak perlu terlalu serius menangani kasus-kasus yang sering disebut sebagai *bullying*/perundungan
- 3 Saya tahu apa yang perlu dilakukan jika ada peserta didik yang melapor telah mengalami *bullying*/perundungan.
- 4 Saya paham cara menangani peserta didik yang menjadi pelaku *bullying*/perundungan

Pemahaman pendidik/kepala satuan pendidikan atas konsep perundungan berbanding terbalik dengan insiden perundungan





# Tingginya potensi insiden kekerasan seksual di satuan pendidikan memerlukan perhatian khusus

**22,4% peserta didik**

menjawab “Pernah” pada pertanyaan survei yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual<sup>1</sup>

1. Data bersumber dari Asesmen Nasional seluruh jenjang (SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA/ sederajat)

Contoh pertanyaan di dalam survei yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual<sup>1</sup>

Jawablah pertanyaan berikut.

*Jika kamu merasa tidak nyaman untuk menjawab, kamu diperbolehkan memilih opsi jawaban "Saya tidak mau menjawab pertanyaan di bagian ini"*

- 1 Apakah siswa lain/pendidik/orang dewasa lain di sekolahmu pernah menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal-hal seksual lain secara langsung?
- 2 Apakah siswa lain/pendidik/orang dewasa lain di sekolahmu pernah menunjukkan bagian tubuh tertentu atau hal-hal seksual lain secara tidak langsung (misal melalui gambar/video di HP atau media sosial)?

# Potensi insiden kekerasan seksual di satuan pendidikan lebih rendah pada satuan pendidikan yang memiliki program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual

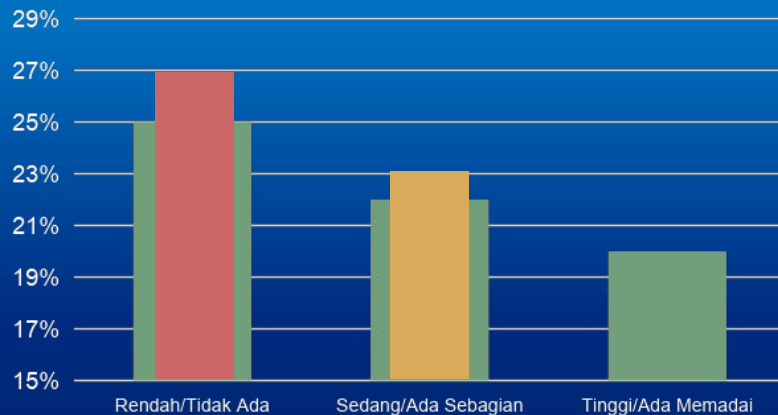
Contoh program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan yang ditanyakan dalam survei

- 1 Seminar atau pelatihan untuk pendidik
- 2 Seminar atau pelatihan untuk peserta didik
- 3 Kampanye dan sosialisasi rutin mengenai pencegahan kekerasan seksual
- 4 Pedoman pencegahan kekerasan seksual



*Keberadaan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan berbanding terbalik dengan potensi insiden kekerasan seksual*

*Persentase peserta didik yang menjawab "pernah" pada pertanyaan survei yang menunjukkan potensi insiden kekerasan seksual*



*Keberadaan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan*

# Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data adalah bagian dari Merdeka Belajar untuk memastikan pendidikan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia

## MERDEKA BELAJAR



# Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data memperbaiki permasalahan peningkatan mutu pendidikan dengan lebih sederhana dan bermakna

## Dahulu

Berbagai sumber dan melakukan pengisian borang berkali-kali

Hasilnya evaluasi yang beragam

Mengukur beragam hal

Perencanaan sebagai pemenuhan dokumen administrasi

## Sekarang

Hanya AN dan Dapodik serta tidak ada pengisian borang-borang tambahan lagi

Evaluasi hanya satu

Mengukur hal yang kunci:  
Mutu hasil belajar  
dan layanan pendidikan

Proses perencanaan sebagai kegiatan bermakna yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan



Perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta



**1. Mengidentifikasi masalah** berdasarkan indikator yang ditampilkan di dalam Rapor Pendidikan

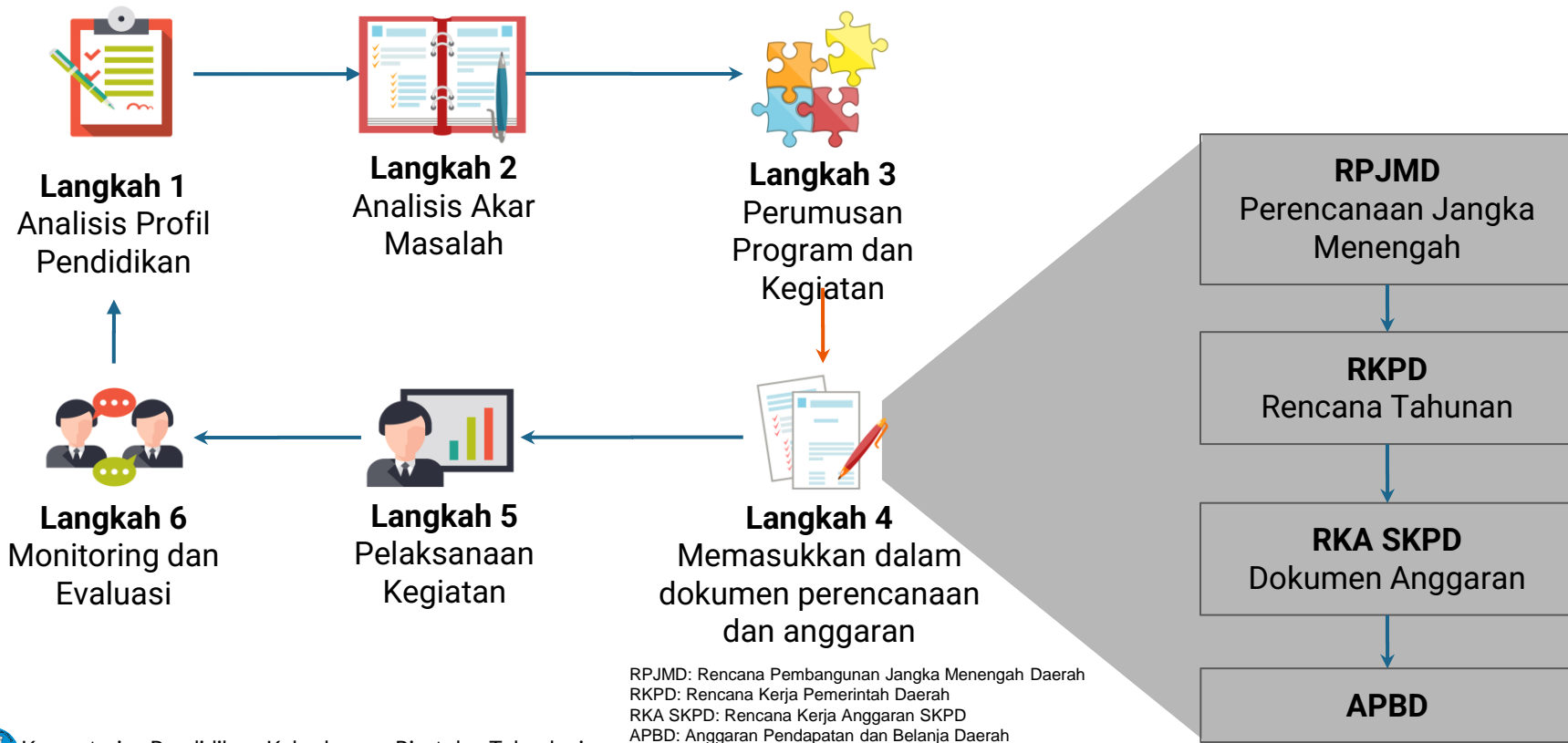


**2. Melakukan refleksi** capaian, pemerataan, dan proses pembelajaran di satuan pendidikan dan daerah masing-masing



**3. Melakukan pembenahan** melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (BOS dan BOP) dan daerah (APBD)

# Perencanaan Berbasis Data adalah proses yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam siklus perencanaan pemerintah daerah



# Perencanaan berbasis data dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan



## Perencanaan Daerah

- Provinsi untuk SMA, SMK, dan SLB
- Kabupaten/Kota untuk PAUD, SD, dan SMP

# Kemendikbudristek akan memfasilitasi satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan berbasis data



## 1. Bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan berbasis data

akan dilakukan mulai bulan Mei hingga sepanjang tahun 2022 bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan



## 2. Dukungan materi untuk belajar mandiri

disiapkan sehingga pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mendalami materi perencanaan berbasis data



**3. Pusat Bantuan** disiapkan untuk menjawab semua pertanyaan terkait rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, serta menerima masukan untuk perbaikan



## Bab 2: Profil Pendidikan dan Platform Rapor Pendidikan

Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

- 01 Memahami definisi, kerangka, dan struktur Profil Pendidikan
- 02 Memahami indikator dalam Profil Pendidikan
- 03 Mampu mengakses dan menggunakan platform Rapor Pendidikan

# Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya



01

**Single source of data** sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan.



02

Alat ukur yang berorientasi **pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output)**



03

Instrumen pengukuran untuk **evaluasi sistem pendidikan** secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal.



04

Profil pendidikan menjadi **sumber data** untuk perencanaan di tingkat satuan pendidikan dan perencanaan di tingkat pemerintah daerah.



05

Instrumen yang **meringankan beban administrasi** satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam dalam proses evaluasi internal dan eksternal.

# Definisi Profil Pendidikan, Rapor Pendidikan, dan Platform Rapor Pendidikan

## Profil Pendidikan



**laporan komprehensif** mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan

## Rapor Pendidikan



**indikator terpilih dari Profil Pendidikan** yang merefleksikan prioritas Kemendikbudristek yang digunakan untuk menilai kinerja daerah dan satuan pendidikan. Rapor Pendidikan diperoleh dari perbandingan nilai indikator antar tahun (akan ditampilkan mulai tahun 2023).




## Platform Rapor Pendidikan







**aplikasi berbasis web** yang menampilkan informasi Profil Pendidikan dan Rapor Pendidikan. Platform Rapor Pendidikan dapat diakses oleh pengguna yang memiliki akun belajar sesuai dengan kewenangannya.

# Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah alat bantu bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk terus bersama memperbaiki kualitas layanan pendidikan

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data adalah perangkat dan cara untuk

-  **Mengidentifikasi akar permasalahan**
-  **Refleksi capaian pendidikan sejauh ini**
-  **Didiskusikan secara konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk membenahi mutu pendidikan**

Rapor Pendidikan dan perencanaan berbasis data bukanlah perangkat dan cara untuk

-  **Menghukum dan mencari siapa yang salah**
-  **Memeringkatkan satuan dan daerah**
-  **Membanding-bandingkan pencapaian**
-  **Menjadi tambahan beban dokumen administrasi yang tidak bermakna**

# Dasar Hukum perencanaan berbasis data diatur dalam PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbudristek No. 09 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

## PP No 57 Tahun 2021

### Pasal 28

- Perencanaan kegiatan Pendidikan bertujuan untuk **peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan** berdasarkan evaluasi diri Satuan Pendidikan.
- Perencanaan kegiatan Pendidikan **dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek** dan rencana kerja jangka menengah.

### Pasal 48

3. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap: a. pendidikan anak usia dini; dan b. pendidikan dasar dan menengah.
4. Evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk **perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan** daerah sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

## Permendikbudristek No 09 tahun 2022

### Pasal 24

- Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan profil pendidikan daerah.
- Evaluasi sistem pendidikan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
  - b. Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

### Pasal 26

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan untuk melakukan **penyesuaian kebijakan dan perencanaan program** dalam rangka **peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan** sesuai dengan kewenangannya.

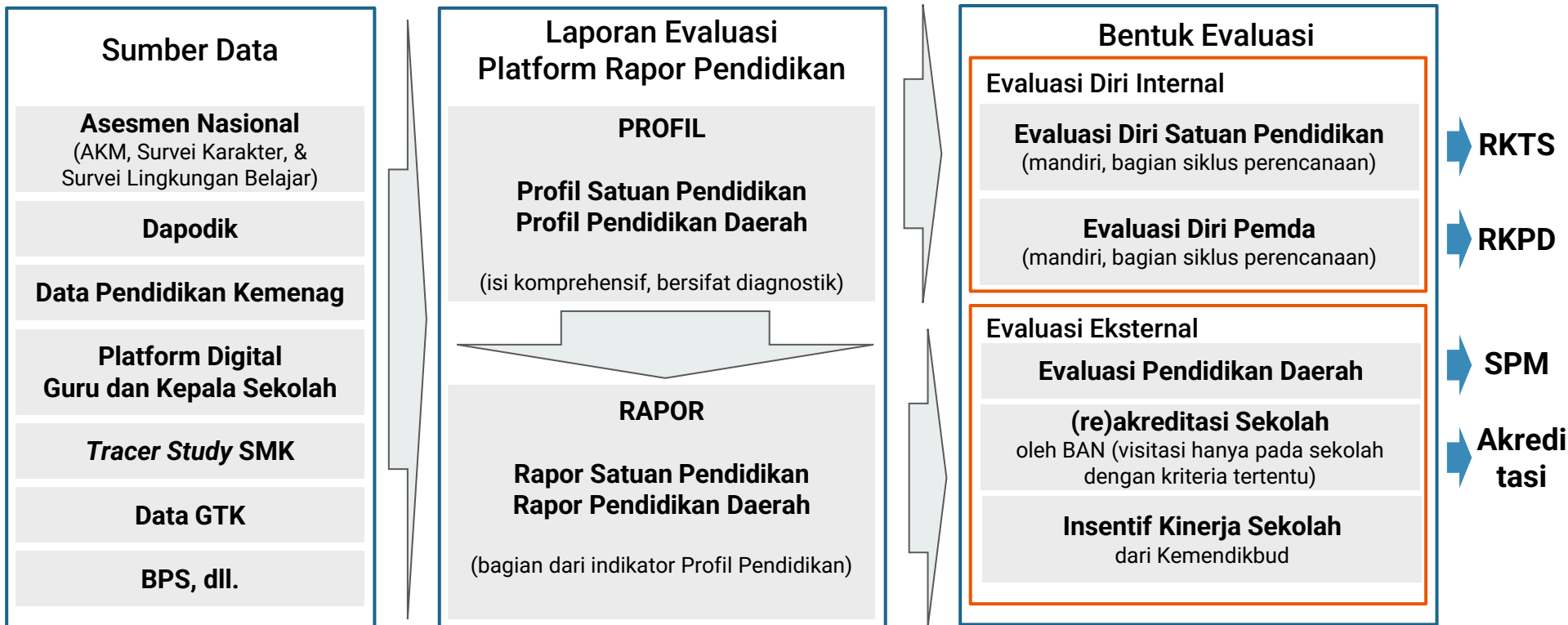
### Pasal 28

Hasil Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimanfaatkan oleh Satuan Pendidikan untuk:

- **mengidentifikasi masalah pendidikan** yang perlu mendapatkan prioritas berdasarkan indikator dalam profil Satuan Pendidikan atau profil program pendidikan kesetaraan;
- mendalami hasil identifikasi masalah pendidikan untuk **menemukan akar masalah dan merumuskan langkah perbaikan**; dan
- melakukan **perencanaan program** untuk mengatasi akar masalah



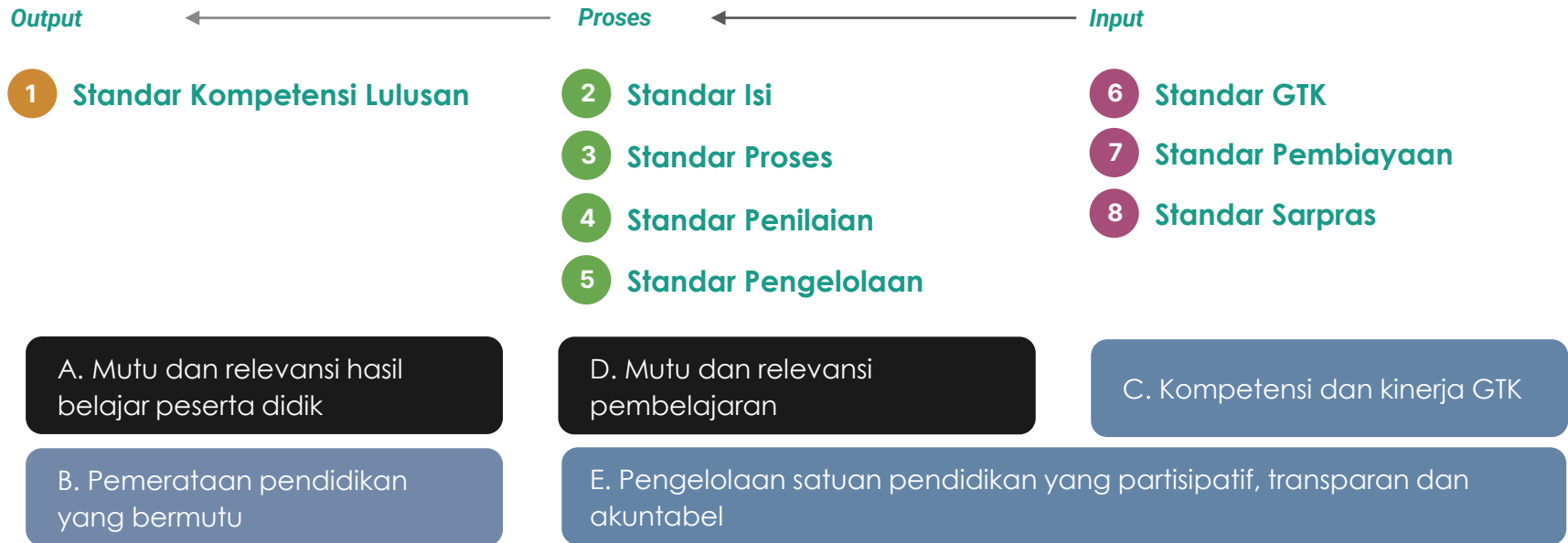
# Profil Pendidikan merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan PAUD Dikdasmen berdasarkan hasil evaluasi sistem pendidikan



# Profil Pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan rapor mutu sebelumnya

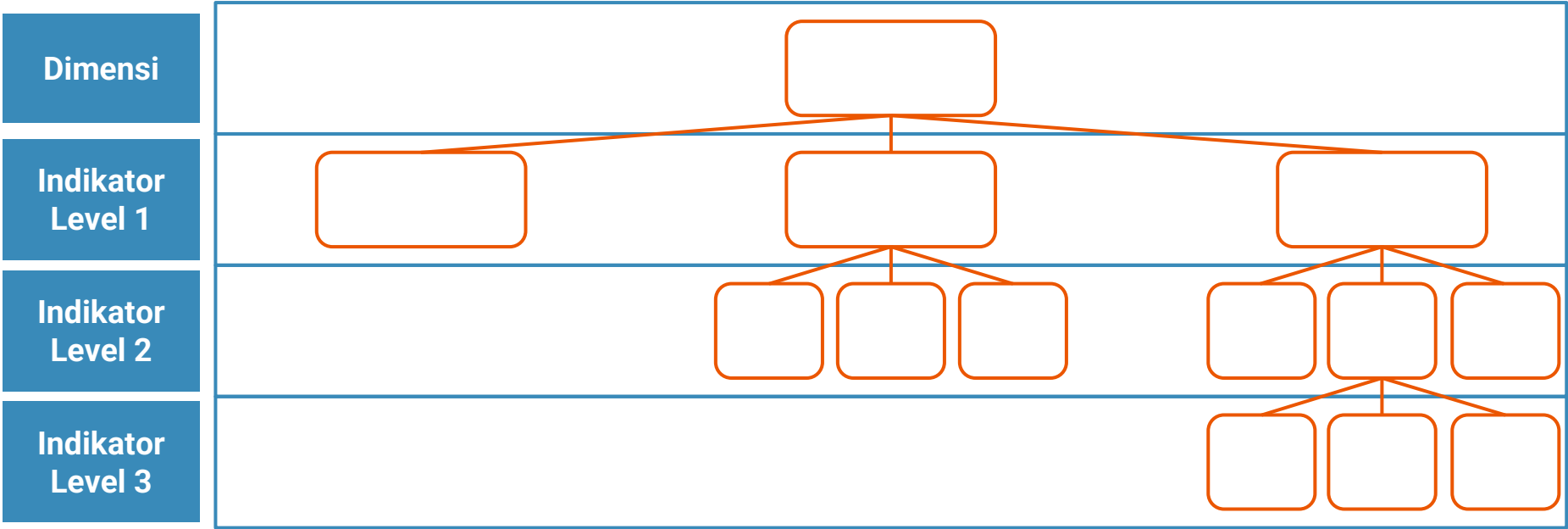
Rapor Pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan delapan Standar Nasional Pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran

## 8 Standar Nasional Pendidikan



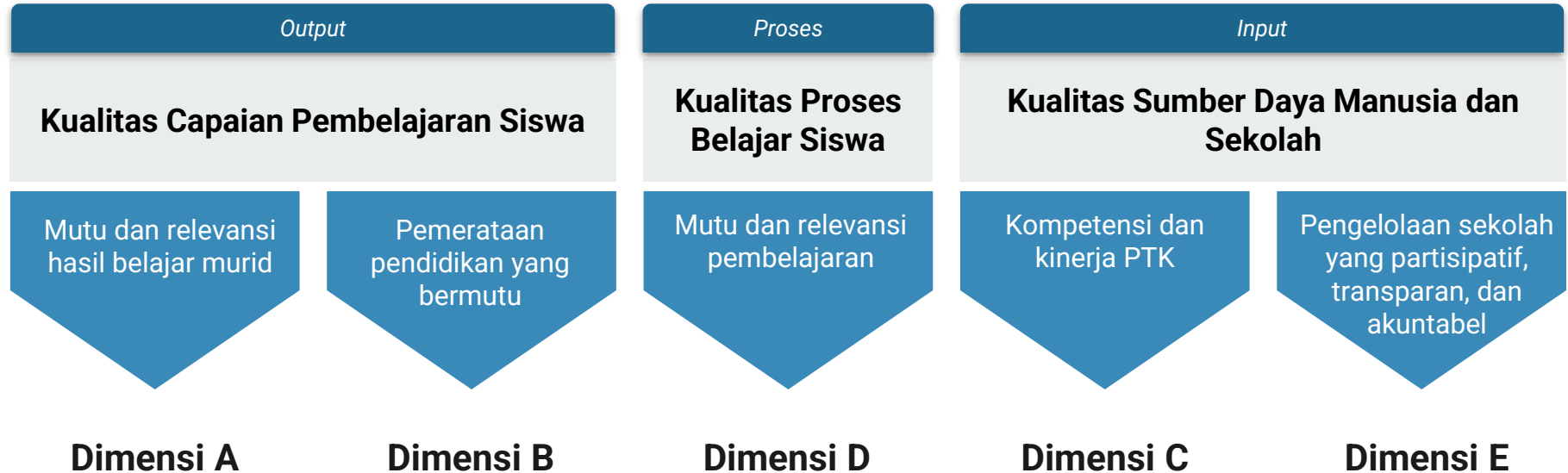
# Setiap dimensi terdiri dari indikator yang tersusun dalam beberapa tingkatan

Tiap dimensi terdiri dari beberapa indikator level 1. Indikator level 1 terdiri dari beberapa indikator level 2, dan indikator level 2 terdiri dari beberapa indikator level 3. Beberapa indikator level 2 tidak memiliki indikator level 3, dan beberapa indikator level 1 tidak memiliki indikator level 2.

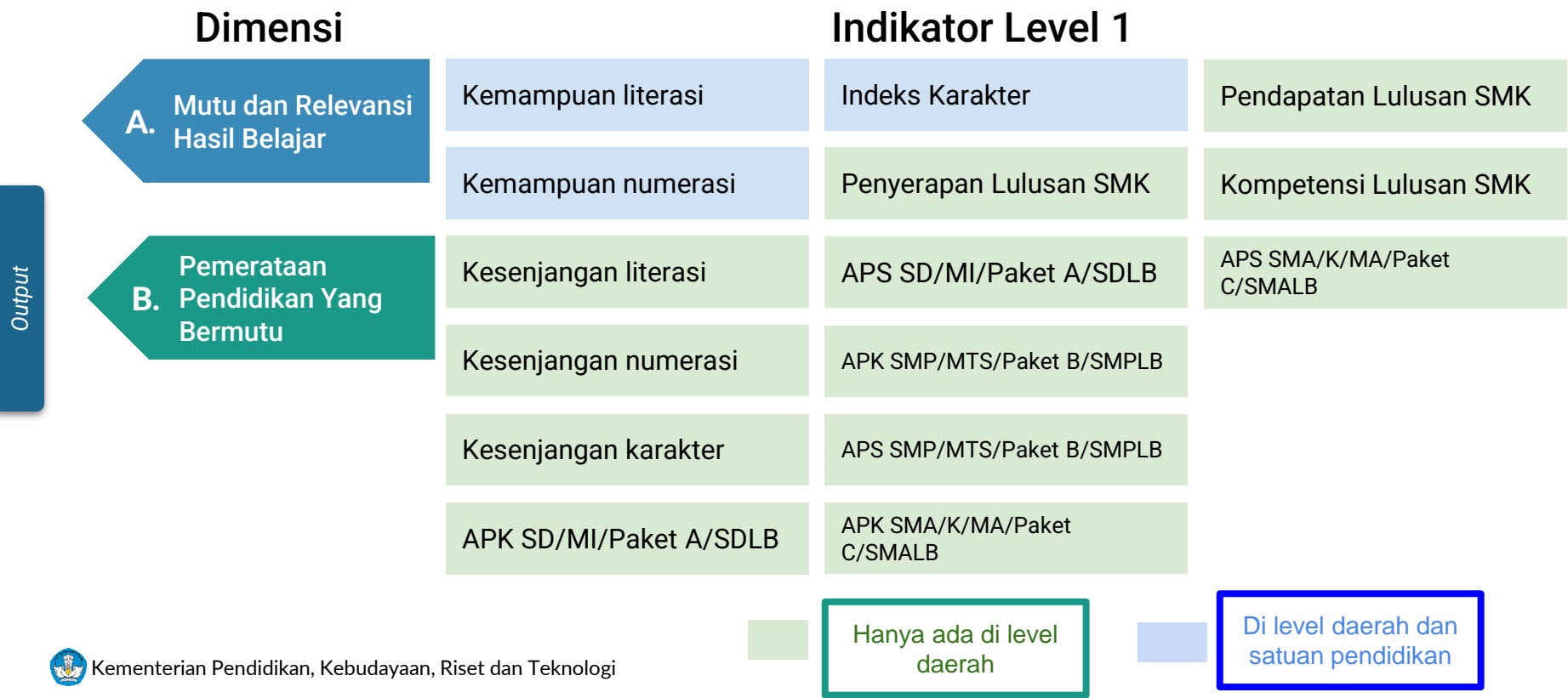




# Struktur Profil Pendidikan Pendidikan Dasar Menengah dan SMK



# Indikator DASMEN



# Indikator DASMEN

## Dimensi

## Indikator Level 1

D. Mutu dan Relevansi Pembelajaran

Kualitas pembelajaran	Iklim inklusivitas
Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru	Kesenjangan Iklim inklusivitas
Kepemimpinan instruksional	Kesenjangan fasilitas sekolah antar wilayah
Iklim keamanan sekolah	Kesenjangan kebersihan sekolah (termasuk sanitasi) antar wilayah
Kesenjangan iklim keamanan sekolah	Kesenjangan bahan dan fasilitas belajar literasi
Iklim kesetaraan gender	Kesenjangan akses dan fasilitas belajar daring
Kesenjangan Iklim kesetaraan gender	Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran
Iklim kebinekaan	Link and match dengan Dunia Kerja
Kesenjangan Iklim kebinekaan	

Hanya ada di level daerah

Di level daerah dan satuan pendidikan

Proses

# Indikator DASMEN

Input

## Dimensi

## Indikator Level 1

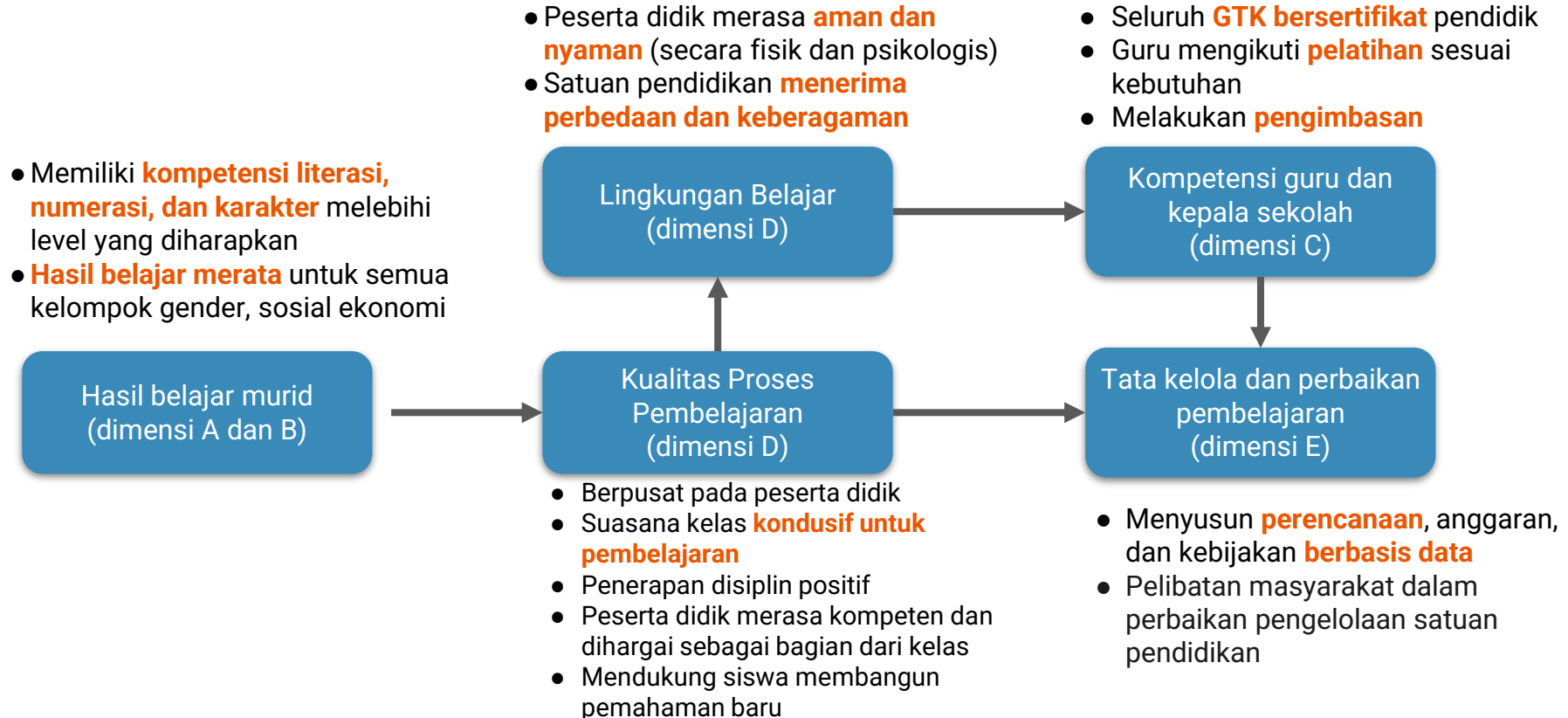
C. Kompetensi dan Kinerja GTK	Proporsi GTK bersertifikat	Kehadiran guru di kelas
	Proporsi GTK penggerak	Indeks distribusi guru
	Pengalaman pelatihan guru	Pemenuhan Kebutuhan Guru
	Kualitas GTK penggerak	Proporsi GTK di SMK yang bersertifikat kompetensi
	Nilai UKG	
E. Pengelolaan sekolah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Partisipasi warga sekolah	Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran
	Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu	Proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan

Hanya ada di level daerah

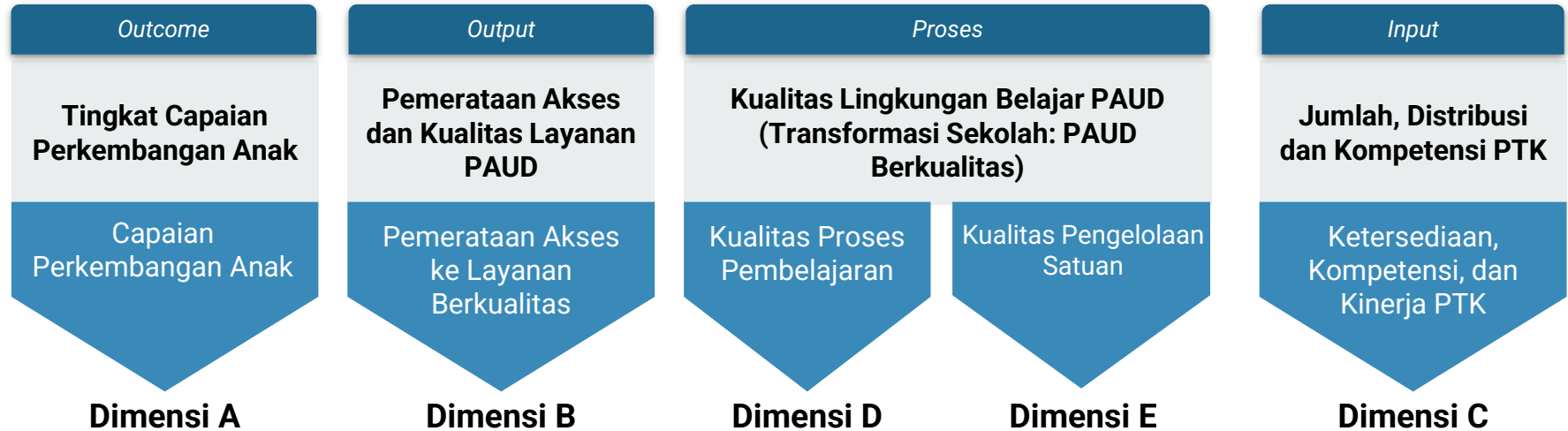
Di level daerah dan satuan pendidikan



# Permasalahan yang terjadi di suatu indikator dapat dicari akar masalahnya dari indikator yang lain



# Struktur Profil Pendidikan PAUD



Catatan untuk perencanaan tahun 2022:

- Indikator dalam dimensi A (Capaian Perkembangan Anak) belum ada di tahun 2022. Kemendikbudristek mengikuti mekanisme pengukuran yang disepakati lintas sektor
- Satuan PAUD menggunakan indikator dalam dimensi D dan E untuk proses perencanaan. Indikator dalam dimensi C belum tersedia untuk satuan PAUD di tahun 2022.
- **Pemerintah daerah** menggunakan indikator dalam **dimensi B dan C** untuk proses perencanaannya. Indikator D dan E belum tersedia untuk pemerintah daerah.

# Indikator PAUD

## Dimensi

### B. Akses yang berkualitas

## Indikator Level 1

Angka Kesiapan Sekolah

Kesenjangan akses PAUD berdasarkan kelompok gender

Angka Partisipasi Kasar (3-6)

Kesenjangan akses PAUD dalam distribusi 1 Desa 1 PAUD

Angka Partisipasi Murni (3-6)

Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B

Angka Partisipasi Murni di PAUD Negeri (3-6)

Pemerataan Akses Anak Usia 3-6 Tahun di Satuan yang Terakreditasi

Kesenjangan akses anak usia dini ke pendidikan berdasarkan status sosial ekonomi (APS 5-6)

Belum tersedia

Hanya ada di level daerah

Di level daerah dan satuan pendidikan



# Indikator PAUD

## Dimensi

C. Ketersediaan,  
Kompetensi, dan  
Kinerja PTK

## Indikator Level 1

Pertumbuhan proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4

Standar kompetensi pendidik

Proporsi pendidik berijazah minimal S1/D4

Proporsi GTK Penggerak

Proporsi Kepala Satuan berijazah minimal S1/D4

Kualitas Guru Penggerak

Proporsi PTK bersertifikat dari PPG

Indeks Distribusi Guru

Sertifikasi diklat berjenjang Kementerian

Ketersediaan jumlah pengawas

Proporsi PTK dalam diklat teknis

Pemenuhan kebutuhan guru

Belum tersedia

Hanya ada di level daerah

Di level daerah dan satuan pendidikan





# Indikator PAUD

## Dimensi

## Indikator Level 1

D.

**Kualitas Proses Pembelajaran**

Perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif

Muatan pengembangan yang sesuai kurikulum

Pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini

Asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran

E.

**Kualitas Pengelolaan Satuan**

Indeks ketersediaan sarana prasarana esensial

Indeks kemitraan dengan orang tua/wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah

Indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah

Indeks layanan holistik integratif

Indeks iklim inklusivitas sekolah

Indeks kapasitas perencanaan

Indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik

Indeks akuntabilitas pembiayaan

Belum tersedia

Indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan

Pemanfaatan sumber daya satuan

Hanya ada di level daerah

Di level daerah dan satuan pendidikan



# Indikator dimensi D dan E sebagai Transformasi Sekolah menuju PAUD Berkualitas

Daerah dan satuan dapat menggunakan indikator di dalam profil pendidikan agar dapat memahami kegiatan dan layanan apa saja yang perlu ada di satuan PAUD, serta merancang pendampingan yang diperlukan bagi **pendidik dan tenaga kependidikan**.

INPUT		PROSES			
Dimensi C		Dimensi D	Dimensi E		
<div><div></div><div>Pendidik dan tenaga kependidikan adalah fondasi dari PAUD Berkualitas. Kapasitas dan kesejahteraan PTK perlu menjadi perhatian agar keempat elemen ini terwujud</div></div>		KUALITAS PROSES PEMBELAJARAN	KEMITRAAN DENGAN ORANG TUA	DUKUNGAN PEMENUHAN LAYANAN ESENSIAL AUD DI LUAR PENDIDIKAN	KEPEMIMPINAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
		<ul style="list-style-type: none"><li>Perencanaan pembelajaran yang efektif.</li><li>Pendekatan pembelajaran memberikan pengalaman menyenangkan, dan berpusat pada anak, sesuai untuk anak usia dini.</li><li>Muatan pengembangan yang selaras dengan kurikulum, menguatkan aspek perkembangan, kontekstual dan bermakna.</li><li>Asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Adanya interaksi terencana dengan orang tua/wali untuk membangun kesinambungan stimulasi dari PAUD dan di rumah (wadah komunikasi, kelas orang tua, komite, kegiatan yang melibatkan orang tua, dst).</li><li>Penguatan peran dan kapasitas orang tua/wali sebagai mitra pengajar dan sumber belajar.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pemantauan tumbuh kembang anak (DDTK/KPSP/KMS/KIA)</li><li>Berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan</li><li>Kelas orang tua, wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak (intervensi gizi-sensitif).</li><li>Menerapkan PHBS melalui pembiasaan.</li><li>Kepemilikan fasilitas sanitasi dan air bersih (minimal, menggunakan material sederhana dan ada air mengalir)</li><li>Memberikan PMT dan/atau makanan bergizi secara berkala (minimal 3 bulan sekali)</li><li>Memantau kepemilikan identitas (NIK) peserta didik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mampu menghadirkan:</li><li>Sarpras Esensial yang berfokus pada keamanan peserta didik dan esensial untuk mendukung kualitas layanan.</li><li>Iklim aman (fisik-psikis)</li><li>Iklim inklusif</li><li>Iklim Partisipatif (trisentra)</li><li>Pengelolaan sumber daya melalui perencanaan berbasis data</li><li>Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru</li></ul>




**Perjalanan pengguna (“user journey”) Rapor Pendidikan Dinas**

# Perjalanan pengguna (“user journey”) Rapor Pendidikan Dinas




1




## Selamat Datang di Rapor Pendidikan


Rapor Pendidikan menampilkan data kualitas satuan pendidikan atau daerah yang didapat dari berbagai asesmen atau survei nasional. Sebagai bentuk penyempurnaan dari Rapor Mutu, Rapor Pendidikan diharapkan bisa menjadi acuan untuk **mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi** kualitas pendidikan Indonesia secara menyeluruh.

[Masuk sebagai Satuan/Dinas Pendidikan](#)[Lihat Data Publik](#)

Masuk menggunakan akun  belajar.id

 Tampilan Rapor Pendidikan paling baik dilihat lewat Firefox/Chrome di komputer/laptop

↓



# Perjalanan pengguna (“user journey”) Rapor Pendidikan Dinas



2 Rapor Pendidikan Beranda **Glosarium** Pusat Bantuan Unduh Kepala Dinas Pendidikan

Dinas Kab. Merdeka Belajar  
Ringkasan Kualitas Pendidikan Kabupaten/Kota Anda

Tampilkan data berdasarkan  
Jenjang/Jenis Layanan: DASAR  
Satuan Pendidikan: SEMUA (SD/MI/PAKET A/SDLB)  
Status Satuan Pendidikan: Semua  
Tampilkan

Semua nilai di bawah belum memperhitungkan nilai dari PKBM, SLB satu atap, dan SLB tanpa jenjang.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/SDLB Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/SDLB Sederajat	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/SDLB Sederajat
2.0	1.5	Data Terbaru Belum Tersedia

Angka Partisipasi Kasar terdiri dari:

- APK berdasarkan kuantitas status sosial ekonomi
- APK berdasarkan kelompok gender
- APK peserta didik disabilitas

Selengkapnya

Angka Partisipasi Sekolah terdiri dari:

- APS berdasarkan kuantitas status sosial ekonomi
- APS berdasarkan kelompok gender
- APS peserta didik disabilitas

Selengkapnya

Tampilkan data berdasarkan  
Jenjang/Jenis Layanan: DASAR  
Satuan Pendidikan: SEMUA (SD/MI/PAKET A/SDLB)  
Status Satuan Pendidikan: Semua  
Tampilkan

Semua nilai di bawah belum memperhitungkan

Angka Partisipasi Kasar (APK)  
SD/MI/Paket A/SDLB Sederajat  
2.0

Angka Partisipasi Sekolah (APS)  
SD/MI/Paket A/SDLB Sederajat  
1.5

Data Terbaru Belum Tersedia

Tampilan fitur “filter” untuk jenjang dan satuan pendidikan

Mutu dan Relevansi Hasil Belajar Didik

Kemampuan Literasi	Kemampuan Numerasi	Indeks Karakter
Baik	Baik	Baik

Kemampuan Literasi terdiri dari:

- Kompetensi membaca teks informasi
- Kompetensi membaca teks sastra

Selengkapnya

Kemampuan Numerasi terdiri dari:

- Kompetensi pada domain Bilangan
- Kompetensi pada domain Aljabar
- Kompetensi pada domain Geometri
- Kompetensi pada domain Data dan Representasi

Selengkapnya

Indeks karakter terdiri dari:

- Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
- Gotong Royong

Selengkapnya

Pengelolaan Sekolah yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Partisipasi Warga Sekolah	Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah
Memadai	Memadai

Partisipasi Warga Sekolah terdiri dari:

- Partisipasi orang tua
- Partisipasi didik

Selengkapnya

Pemanfaatan Sumber Daya Sekolah terdiri dari:

- Proporsi pembelajaran peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan
- Proporsi pembelajaran non personil mutu pembelajaran

Selengkapnya

Proporsi pemanfaatan APBD untuk pendidikan

Memadai

Pemanfaatan sumber daya sekolah

Memadai

Peserta Didik sudah mampu menarik kesimpulan tapi belum mahir bermitra...

Selengkapnya

# Perjalanan pengguna (“user journey”) Rapor Pendidikan Dinas



3


Rapor Pendidikan

Beri Saran

Beranda Glosarium Pusat Bantuan **Unduh** K kepala-daerah-prov-scoreca ...

## Unduh Rapor Pendidikan

Dapatkan data lengkap Rapor Pendidikan Anda dalam bentuk Ms. Excel.

 Laporan yang terunduh akan terdiri dari:

1. Data ringkasan
2. Detail data dari masing-masing indikator

**i Data akan diperbarui secara berkala**

Data Rapor Pendidikan akan diperbarui secara berkala sesuai dengan pengkinian sumber data setiap indikator.

Tahun

2022

Unduh

## Bab 3: Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah Daerah

Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

**01** Mengidentifikasi masalah berdasarkan Rapor Pendidikan

**02** Melakukan refleksi untuk mendapatkan akar masalah

**03** Melakukan pembenahan dengan menetapkan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah

Contoh simulasi Perencanaan Berbasis Data terbagi dalam 2 bagian:

1. Provinsi
2. Kabupaten/Kota

# Perencanaan berbasis data membantu satuan pendidikan dan pemerintah daerah untuk melakukan **perubahan bermakna** dalam perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan mutu pendidikan



01

Menggunakan data dari Rapor Pendidikan yang terintegrasi, komprehensif, dan objektif



02

Melakukan refleksi diri dan perbaikan berkelanjutan dari tahun ke tahun



03

Melibatkan pemangku kepentingan secara aktif dalam proses perencanaan



04

Pendampingan yang menyeluruh dan berkelanjutan



05

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang terus menerus



# Tahapan pelaksanaan Perencanaan Berbasis Data disusun agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi, merefleksikan, dan membenahi kondisi layanan pendidikan menggunakan data yang tersedia di Rapor Pendidikan



01

Pemerintah daerah membaca Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan yang dihadapi



02

Disdik dan pemangku kepentingan di daerah melakukan refleksi diri untuk menemukan akar permasalahan dari tantangan yang dihadapi



03

Disdik dan pemangku kepentingan di daerah menentukan program dan kegiatan untuk menyelesaikan akar masalah, menetapkan target capaian, dan memasukkannya di dalam dokumen perencanaan.



04

Disdik dan pemangku kepentingan di daerah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan



05

Disdik melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat keterlaksanaan kegiatan dan melihat perubahan capaian di Rapor Pendidikan di tahun berikutnya

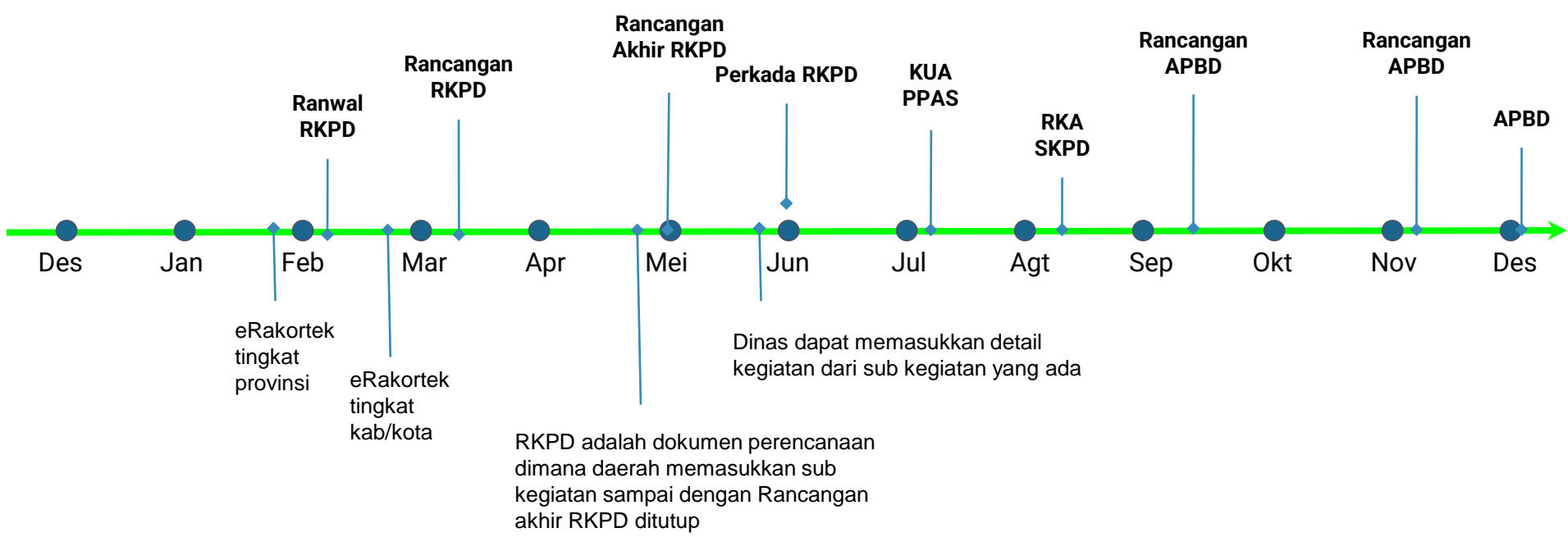


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

# Perencanaan Berbasis Data Tingkat Provinsi



# Jadwal perencanaan pemerintah daerah dimulai dari perencanaan pembangunan daerah sampai disahkannya APBD



# Terdapat 14 indikator kinerja urusan pendidikan untuk Provinsi sebagai Standar Pelayanan Minimal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu

Kelompok Indikator	Indikator Kinerja Urusan Provinsi
<b>1</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>	1. Jumlah Anak Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (APS) 2. Jumlah Anak Usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)
<b>2</b> <b>Kualitas Hasil Belajar</b>	3. Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan AN 4. Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan AN 5. Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan AN 6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan AN 7. Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan AN 8. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan AN 9. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan AN 10. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan AN 11. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan AN 12. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan AN
<b>3</b> <b>Kualitas Lulusan SMK</b>	13. Tingkat Penyerapan Lulusan SMK 14. Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK.

## Pemenuhan Minimal

### Perumusan identifikasi, refleksi dan benahi untuk indikator SPM

1. Perumusan berikut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai referensi pemenuhan minimal dalam memilih masalah, merumuskan akar masalah dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Pemerintah daerah memprioritaskan perumusan minimal ini untuk dipilih dalam perencanaan daerah.
2. Jika suatu daerah pemenuhan SPM nya sudah tercapai dan mempunyai kemampuan keuangan lebih, maka dapat menambahkan kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah di luar yang ditetapkan dalam pemenuhan minimal ini

## Mengapa APS belum 100%?

Ada berapa jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah?



Apakah jumlah ruang kelas dan/atau sekolah sudah mencukupi?



Apakah anak usia tertentu tersebut tidak bersekolah karena terkendala biaya?



Apakah karena isu sosial budaya atau adat istiadat?

# Pemenuhan minimal Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai target	Belum tersedianya data jumlah anak usia 16-18 tahun dan 4-18 tahun yang tidak bersekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah</li> <li>• Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah</li> </ul>
	Jumlah kelas/sekolah kurang dibandingkan jumlah anak usia sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, terutama di wilayah 3T
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
	Peserta didik terkendala biaya personil	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu

# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah tingkat Provinsi

## Kegiatan: Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan semua anak usia sekolah bersekolah. Oleh karena itu, Pemda perlu mengetahui jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah di daerahnya. Data yang dibutuhkan adalah:

- a) Karakteristik demografis (nama, alamat, dll)
- b) Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial, bekerja, menikah, tidak termotivasi)

Data yang detail terkait karakteristik anak dan latar belakang penting sebagai dasar untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

### Metode

1. Perhitungan jumlah anak tidak sekolah dapat dilakukan dengan membandingkan jumlah anak yang sekolah dari dapodik dan jumlah anak usia sekolah dari data dukcapil. Hasilnya adalah data awal anak tidak sekolah
2. Pemda kemudian melakukan verifikasi melalui perangkat pemerintahan dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan kabupaten/kota, termasuk mendata alasan tidak sekolah
3. Data yang terkumpul dikelola dalam sistem pendataan yang dibangun oleh Pemda

Kemdikbudristek membangun aplikasi untuk mendata anak tidak sekolah yang informasinya dapat menghubungi Ditjen Paudnasmen





# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah tingkat Provinsi

## Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan semua anak usia 4-18 penyandang disabilitas untuk bersekolah. Oleh karena itu, Pemda perlu mengetahui jumlah anak usia 4-18 penyandang disabilitas yang tidak bersekolah di daerahnya.

Data yang dibutuhkan adalah:

1. Karakteristik demografis (nama, alamat, dll)
2. Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial, bekerja, menikah, tidak termotivasi)

Data yang detail terkait karakteristik anak dan latar belakang penting sebagai dasar untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Olahan data Susenas, BPS dan data Dapodik

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat Provinsi

## Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T. Oleh karena itu, Pemda perlu mengetahui jumlah layanan pendidikan yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T di daerahnya.

Data yang dibutuhkan adalah:

1. Karakteristik demografis (jenis wilayah, aksesibilitas, ketersediaan listrik dan internet)
2. Jumlah satuan pendidikan yang tersedia (per jenjang, per wilayah, jarak antar satuan pendidikan).

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional
2. Permendikbud No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2194](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2194)
2. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2407](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2407)
3. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2413](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2413)



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat Provinsi

## Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T

### Deskripsi kegiatan

Upaya memenuhi target APS tersebut dapat dilakukan dalam 3 hal:

#### **1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan melalui penambahan ruang kelas baru (RKB) & rehabilitasi RKB sehingga dapat digunakan kembali**

- A. Menghitung jumlah RKB yang diperlukan secara agregat. Dengan cara  $APS = \frac{\text{jumlah siswa bersekolah}}{\text{jumlah penduduk usia sekolah}}$ . Dengan asumsi 1 RKB bisa menampung 36 siswa dan dengan target APS tertentu (selisih target APS dengan riil APS), kebutuhan RKB dapat dihitung dengan membagi selisih jumlah siswa bersekolah hasil target dikurangi kondisi riil.
- B. Melakukan pemetaan mikro (di level sekolah) sekolah mana sajakah yang “urgently” memerlukan penambahan RKB;

- C. Mengusulkan sekolah-sekolah tersebut untuk mendapatkan RKB melalui program DAK Fisik;
- D. mengidentifikasi sekolah-sekolah yang RKB-nya mengalami kerusakan;
- E. Mengusulkan rehabilitasi RKB melalui program DAK Fisik.

#### **2. Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan formal / non formal**

- A. Melakukan pendataan secara berjenjang dari level Kab/Kota, Kecamatan, & Kelurahan;
- B. Mendata identitas individu (ATS);
- C. Menyediakan alternatif layanan pendidikan formal & informal;
- D. karena alasan fleksibilitas waktu untuk bekerja, ATS mungkin lebih memilih pendidikan non formal & untuk meningkatkan keterampilan bekerja



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat Provinsi

## Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T

### Deskripsi kegiatan

#### 3. Mencegah siswa putus sekolah

- A. Memfasilitasi & mengadvokasi sekolah untuk melakukan pencegahan siswa putus sekolah;
- B. Strategi pencegahan dini siswa putus sekolah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi siswa yang rentan putus sekolah (banyak absen, berperilaku indisipliner, perkembangan belajar terganggu);
- C. Melakukan pendampingan secara intensif & per individu siswa rentan putus sekolah sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Buku strategi pencegahan siswa rentan putus sekolah agar tidak putus sekolah

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. [https://pustaka-sma.kemdikbud.go.id:4353/index.php?p=show\\_detail&id=106&keywords=](https://pustaka-sma.kemdikbud.go.id:4353/index.php?p=show_detail&id=106&keywords=)
2. <https://www.youtube.com/watch?v=fCgLwFHWd2s>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat Provinsi

## Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus

<p><b>Deskripsi kegiatan</b></p> <p>Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memastikan pembiayaan pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus di daerahnya.</p> <p>Data yang dibutuhkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu.</li><li>2. Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial, bekerja, menikah, tidak termotivasi).</li><li>3. Pembiayaan biaya non personel melalui BOS Daerah</li></ol>	<p><b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b></p> <p>Dapodik Data BPS</p> <p><b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b></p>
---	---



## Mengapa kompetensi literasi dan numerasi masih rendah?



**Apakah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah terpenuhi?**



**Apakah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sudah merata?**



**Apakah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sudah baik?**



**Apakah kualitas proses pembelajaran sudah baik?**



**Apakah sekolah sudah kondusif untuk melakukan pembelajaran?**



**Apakah tersedia perlengkapan pembelajaran ?**

# Pemenuhan minimal kemampuan literasi dan numerasi di Provinsi (1/2)

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Kemampuan literasi (A.1) dan numerasi rendah (A.2)	Data PTK belum terpetakan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
	Distribusi PTK belum merata	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
	Jumlah PTK belum mencukupi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Pendidikan Khusus	Pengajuan formasi guru ASN (PPPK)
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
	Jumlah pengawas dan kepala sekolah yang berkualitas belum mencukupi	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah (Atas/Kejuruan)	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah
	Iklim keamanan sekolah masih perlu ditingkatkan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi



## Pemenuhan minimal kemampuan literasi dan numerasi di Provinsi (2/2)

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Kemampuan literasi (A.1) dan numerasi rendah (A.2)	Kualitas PTK dan/atau kualitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
			Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
			Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	Perlengkapan pembelajaran belum mencukupi	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan buku teks dan non teks
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi dapat melakukan penataan untuk memastikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) terdistribusi secara merata. Untuk melakukan penataan, langkah yang dapat dilakukan:

1. Memiliki data jumlah PTK yang terdata di Dapodik dan memastikan seluruh PTK terdata dengan benar di Dapodik
2. Memiliki peta kelebihan dan kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Dapodik pada setiap satuan Pendidikan.
3. Melakukan distribusi dari satuan pendidikan yang memiliki kelebihan PTK ke satuan pendidikan yang kekurangan PTK

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Dapodik
2. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi perlu memiliki peta kebutuhan Pengawas Sekolah. Langkah yang dapat dilakukan:

1. Memiliki data satuan pendidikan yang berada dalam kewenangan
2. Memiliki data jumlah Pengawas dan memastikan seluruh pengawas terdaftar di SIMTendik
3. Membuat peta kebutuhan Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan binaan

### Rujukan dokumen program / kegiatan

PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

Deskripsi kegiatan	Rujukan dokumen program / kegiatan
<p>Pemerintah Provinsi perlu melakukan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berkualitas agar tidak menumpuk pada satu satuan pendidikan. Untuk melakukan distribusi, langkah yang dapat dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Memiliki data jumlah PTK beserta status kualifikasi dan sertifikat pendidik yang terdata di Dapodik.</li><li>2.Melakukan distribusi PTK berkualitas dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan PTK berkualitas</li></ol>	Dapodik
	Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

<b>Deskripsi kegiatan</b>  Pemerintah Provinsi dapat mengajukan formasi untuk mengisi kekurangan Guru ASN baik yang diakibatkan oleh pensiun ataupun lainnya, dengan langkah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki peta kelebihan dan kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Dapodik pada setiap satuan Pendidikan.</li><li>2. Mengajukan formasi Guru ASN melalui aplikasi E-Formasi KemenPANRB disertai dengan SPTJM Kepala Daerah</li></ol>	<b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b>  Dapodik E-Formasi KemenPANRB  <b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b>
---	---



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

**Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab menyediakan minimal 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus pada Satuan Pendidikan Inklusif. Langkah yang dapat dilakukan adalah **melaksanakan Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus**

## Rujukan dokumen program / kegiatan

Pedoman Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://gpk.gtk.kemdikbud.go.id>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Deskripsi kegiatan

Kemendikbud ristek telah menyiapkan program percepatan karir guru menjadi kepala sekolah melalui Program Guru Penggerak dan penerbitan Permenbudikbudristek nomor 40 tahun 2021.

Kebijakan percepatan guru penggerak menjadi pengawas juga sedang dirancang.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Dokumen Salinan: [https://bit.ly/Dokumen\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/Dokumen_Permendikbudristek40_2021)
2. Surat Edaran (SE): [https://bit.ly/SE\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/SE_Permendikbudristek40_2021)

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. Booklet: [https://bit.ly/Booklet\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/Booklet_Permendikbudristek40_2021)
2. Paparan Sosialisasi: [https://bit.ly/Paparan\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/Paparan_Permendikbudristek40_2021)
3. Video Dukungan Pemda: [https://bit.ly/VideoDukunganPemda\\_PGP](https://bit.ly/VideoDukunganPemda_PGP)
4. FAQ: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/faq>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah provinsi bertanggung jawab memfasilitasi sekolah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang menuju bebas perundungan dan perilaku kekerasan. Alternatif aktivitas yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

1. Mengidentifikasi sekolah yang relatif besar terjadinya tindak perundungan dan kekerasan;
2. Melakukan pendampingan pada sekolah point 1 tersebut di atas, dapat dilakukan dengan mengacu pada program roots
3. Melakukan kampanye anti perundungan untuk sekolah secara keseluruhan agar tercipta kesadaran tentang pentingnya pencegahan tindak kekerasan. Direktorat SMA punya tag line “Gen Arung” dalam hal ini kepanjangan dari Generasi Anti Perundungan

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Roots Program <https://rootsindonesia.id/>

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. <https://www.youtube.com/watch?v=XQhhMuy1uzM&t=27s>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=CMAMZuOJmlw&t=123s>
3. [https://www.youtube.com/watch?v=c\\_YCCkQXbJE&t=27s](https://www.youtube.com/watch?v=c_YCCkQXbJE&t=27s)
4. <https://www.youtube.com/watch?v=nV7qGAWjNyg&t=392s>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=a0L2-2hIRM4&t=476s>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=hXJ1M6Kz3f8>
7. <https://www.youtube.com/watch?v=CpFoowN-tV8&t=12s>
8. <https://www.youtube.com/watch?v=4fNgJS5eRWY&t=47s>
9. “sekolah gaul anti kekerasan” pada link [https://pustaka-sma.kemdikbud.go.id:4353/index.php?p=show\\_detail&id=74&keywords=](https://pustaka-sma.kemdikbud.go.id:4353/index.php?p=show_detail&id=74&keywords=)



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

**Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah daerah dapat melakukan:

1. Sosialisasi kepada sekolah tentang apa yang dimaksud dengan perilaku radikalisme & intoleransi;
2. Sosialisasi kepada sekolah tentang jenis-jenis perilaku radikalisme & intoleransi yang mungkin saja terjadi di sekolah;
3. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan perilaku radikalisme & intoleransi yang bisa saja terjadi di sekolah;
4. Hasil yang bisa diwujudkan adalah penanaman perilaku saling menghormati perbedaan agama, suku, bangsa, pemikiran, ide yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yaitu berkebhinekaan global

## Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Definisi & Pemahaman Perilaku Radikalisme & Intoleransi
2. Strategi Sekolah Mencegah Radikalisme & Intoleransi

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. <https://www.youtube.com/watch?v=0m8JCMVkJUAI>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=ymYiofzGi4M&t=104s>





# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

**Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK di wilayahnya. Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1.Mendorong PTK untuk memiliki kualifikasi minimal S-1/D-IV
- 2.Mempersiapkan PTK mengikuti pre-test dan Uji Kompetensi program sertifikasi

## Rujukan dokumen program / kegiatan

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

**Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak**

## Deskripsi kegiatan

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

Pemerintah Provinsi dapat mendorong Guru atau Kepala Sekolah untuk mengikuti Program Guru Penggerak.

## Rujukan dokumen program / kegiatan

Merdeka Belajar 5 Program Guru Penggerak

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru

<u>Opsi program/kegiatan yang dapat dipilih:</u>	<u>Keterangan tambahan</u>
<b>1.Merdeka Belajar 7 (PSP) dan atau;</b>	a.Penguatan Pokja Manajemen Operasional (PMO) b.Bimtek penguatan komite pembelajaran
<b>2.IKM atau Merdeka Belajar 15 (Kurikulum Merdeka &amp; Platform Merdeka Mengajar) dan atau;</b>	a.Bimtek Kurikulum Merdeka b.Bimtek/seminar/lokakarya Platform Merdeka Mengajar
<b>3.Merdeka Belajar 19 (Platform Rapor Pendidikan) dan atau;</b>	a.Bimtek Perencanaan Berbasis Data b.Bimtek platform rapor pendidikan
<b>4.Merdeka Belajar 4 (Program Organisasi Penggerak)</b>	
<u>Rujukan dokumen program / kegiatan:</u>	
1.Laman PSP: <a href="https://bit.ly/LamanPSP">https://bit.ly/LamanPSP</a> 2.Laman kurikulum: <a href="https://bit.ly/LamanKurikulum">https://bit.ly/LamanKurikulum</a> :	



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

**Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut**

Deskripsi kegiatan	Rujukan dokumen program / kegiatan
	Tautan untuk mengakses dokumen / informasi
<p>Pemerintah Provinsi dapat membentuk dan menetapkan komunitas belajar antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)</li><li>2. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)</li><li>3. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKPS)</li></ol> <p>serta memastikan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah aktif dalam kelompok kerja.</p>	



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

**Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik

## Rujukan dokumen program / kegiatan

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

<b>Deskripsi kegiatan</b>  Pemerintah Provinsi dapat mendorong PTK mengikuti program beasiswa pendidikan indonesia.  Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan agar PTK dapat memiliki kualifikasi minimal S-1/D-IV serta dapat mengikuti program sertifikasi.	<b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b>
	<b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b>  <a href="https://beasiswa.kemdikbud.go.id/">https://beasiswa.kemdikbud.go.id/</a>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi dapat mendorong Guru mengikuti program Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) dan atau; mengikuti Bimtek/seminar/lokakarya Platform Merdeka Mengajar

Dinas Pendidikan Provinsi dapat mensosialisasikan tentang program Guru Belajar dan Berbagi kepada para guru sebagai wadah guru untuk bertukar informasi dan memperkaya ilmu terkait pembelajaran

### Rujukan dokumen program / kegiatan

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. <https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/>
2. <https://guru.kemdikbud.go.id/>
3. <https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pengadaan buku teks dan non teks

### Deskripsi kegiatan

Dinas pendidikan dapat memfasilitasi pengadaan buku teks dan non teks melalui e-Katalog LKPP.

Selain itu, dinas pendidikan juga dapat mendukung sekolah-sekolah yang akan menjalin kerja sama dengan perusahaan (CSR) dalam hal pengadaan buku-buku yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Dinas Pendidikan dapat mendorong sekolah untuk memanfaatkan buku elektronik dari Kemendikbudristek yang tersedia di laman Kemendikbudristek

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Pengadaan Buku melalui e-Katalog LKPP

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://buku.kemdikbud.go.id/>





# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi di tingkat Provinsi

## Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah dapat mengajukan DAK Fisik untuk pemenuhan sarana prasarana TIK

Pemerintah dapat mendorong sekolah untuk menggunakan platform SIPlah dalam proses pengadaan barang

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/dana-alokasi-khusus-dak>



### Mengapa kualitas lulusan SMK belum optimal?



**Apakah tersedia data  
keterserapan lulusan?**



**Apakah sudah ada  
kemitraan antara SMK  
dengan dunia kerja?**



**Apakah fasilitas  
peningkatan  
kompetensi lulusan  
SMK tersedia?**



**Apakah sudah ada  
sertifikasi kompetensi  
PTK dan peserta didik?**

# Pemenuhan minimal Kualitas Lulusan SMK di Provinsi

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Data keterserapan lulusan belum tersedia	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan
	Kemitraan antara SMK dan dunia kerja belum terjalin	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja
	Fasilitas peningkatan kompetensi lulusan SMK belum tersedia	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Membangun Bengkel/Unit Produksi/Teaching Factory untuk mendukung penguatan kompetensi siswa dan kerjasama dengan industri
	Sertifikasi kompetensi PTK dan peserta didik masih rendah	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik
Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK belum optimal	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Fasilitasi kelembagaan dan manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK

# Program kegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk peningkatan Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

## Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab dalam memastikan SMK melakukan penelusuran lulusan untuk mendapatkan umpan balik terhadap kesesuaian pembelajaran di SMK dengan kebutuhan dunia kerja.

Hal ini dapat dilakukan dengan :

- 1) Memastikan SMK melakukan **pendataan** terhadap alumni atau lulusannya, seperti: alamat surel, nomor telepon, dst.
- 2) Melakukan **kegiatan survey** kepada alumni atau lulusan SMK tersebut dengan cara mengontak mereka melalui jalur komunikasi yang sudah di data
- 3) Data survey yang diminta kepada alumni setidaknya meliputi:
  - a) Tahun kelulusan, konsentrasi keahlian
  - b) status bekerja/wirusaha/melanjutkan studi
  - c) lokasi bekerja/wirusaha/melanjutkan studi,
  - d) Jenis pekerjaan/wirusaha/studi lanjut
  - e) rentang gaji/pendapatan,
  - f) Umpan balik mengenai kesesuaian antara materi yang dipelajari di SMK dan yang dibutuhkan di dunia kerjanya
- 4) Melakukan analisis terhadap hasil survey untuk dapat melihat persentase keterserapan dan prospek keberkerjaan lulusan SMK

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Tracer Study Dit Mitras DUDI 2021

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

[Tracervokasi.kemdikbud.go.id](https://tracervokasi.kemdikbud.go.id)



# Program kegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk peningkatan Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

## Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja

Deskripsi kegiatan	Rujukan dokumen program / kegiatan
<p>Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan fasilitasi antara dunia kerja dan SMK dalam rangka menyesuaikan pembelajaran di SMK.</p> <p>Hal ini dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Secara rutin memetakan dunia kerja yang berpotensi menjadi mitra SMK. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas ketenagakerjaan, dinas perindustrian, dan asosiasi industri/pengusaha daerah atau nasional yang relevan</li><li>2) Melakukan promosi bagi potensi mitra agar mau bekerja sama dengan SMK. Contoh: melakukan kegiatan ekspo karya SMK untuk industri</li><li>3) Mendorong agar mitra dunia kerja bekerja sama dengan SMK secara strategis dan taktis. Contoh: dunia kerja turut serta dalam penyelarasan kurikulum di konsentrasi keahlian yang relevan di SMK, memberi kesempatan praktek kerja lapangan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen kurikulum operasional sekolah</li><li>2. Dokumen panduan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila</li><li>3. Dokumen panduan pembelajaran dan asesmen</li><li>4. Permendikbud 50/2020 mengenai praktek kerja lapangan</li></ol> <p><b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/Panduan_KOS.pdf">https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/Panduan_KOS.pdf</a></li><li>2. <a href="https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/PPA_2021.pdf">https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/PPA_2021.pdf</a></li><li>3. <a href="https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/PP5_2021.pdf">https://kurikulum.kemdikbud.go.id/wp-content/unduh/PP5_2021.pdf</a></li><li>4. <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163849/permen-dikbud-no-50-tahun-2020">https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163849/permen-dikbud-no-50-tahun-2020</a></li></ol>

# Program kegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk peningkatan Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

## Membangun Bengkel/Unit Produksi/Teaching Factory untuk mendukung penguatan kompetensi siswa dan kerjasama dengan industri

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi bertanggung jawab untuk memastikan pembelajaran berbasis dunia kerja terwujud di SMK.

Hal ini dapat dilakukan dengan:

- 1) Merujuk pada pemetaan kondisi pembelajaran SMK di daerahnya dan bagaimana pelaksanaan praktek/ dalam SMK tersebut yang ada di rapor pendidikan
- 2) Mengalokasikan dana dari Dana Alokasi Khusus bagi SMK untuk mendukung pengembangan project based learning dalam berbasis dunia kerja
- 3) Meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah SMK mengenai pengelolaan project based learning dalam bengkel/unit produksi/teaching factory
- 4) Mendorong kerja sama industri dan SMK dalam mengembangkan project based learning di Bengkel/Unit Produksi/Teaching Factory

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Praktik baik pengelolaan bengkel/unit produksi/teaching factory di SMK
2. Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. <https://gurubelajardanberbagi.kemdikbud.go.id/>
2. <http://103.40.55.195/tefa>
3. <http://kurikulum.ditpsmk.net/smkpk/video>



# Program kegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk peningkatan Tingkat Penyerapan Lulusan SMK

## Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi Peserta Didik

<p>Deskripsi kegiatan</p> <p>Pemerintah Provinsi bertanggung jawab mendukung ekosistem pendidikan vokasi di SMK dengan memberikan akses informasi terkait lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi</p> <p>Hal ini dapat dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Memetakan konsentrasi keahlian yang dilatih di SMK di daerah masing-masing</li><li>2) Memetakan sertifikasi yang dibutuhkan bagi peserta didik dalam konsentrasi keahlian terkait</li><li>3) Memetakan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi di daerah maupun di nasional yang mendorong sertifikasi kompetensi bagi peserta didik.</li><li>4) Memberikan informasi pemetaan ini kepada SMK, dunia kerja dan publik agar dapat menjadi rujukan bagi kerja sama</li></ol>	<p>Rujukan dokumen program / kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Isi Pendidikan Nasional</li></ol> <p>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <a href="https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220211_105800_Salinan%20Permendikbudristek%20Nomor%207%20Tahun%202022_JDIH.pdf">https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20220211_105800_Salinan%20Permendikbudristek%20Nomor%207%20Tahun%202022_JDIH.pdf</a></li></ol>
--	---



# Program kegiatan yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah untuk peningkatan Kepuasan Dunia Kerja terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK

## Fasilitasi kelembagaan dan manajemen BKK dalam rangka meningkatkan penyerapan lulusan SMK

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk mendukung keterserapan lulusan SMK melalui BKK yakni pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja untuk lulusan SMK.

Pelaksanaan BKK dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

### Hal ini dapat dilakukan dengan

- 1) Meningkatkan kapastias Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah (bidang hubungan industri, atau yang relevan), dan guru dalam pemahaman mengenai kelembagaan dan pengelolaan BKK di SMK
- 2) Melakun penelurusan lulusan SMK melalui BKK
- 3) Melakukan fasilitasi kegiatan di daerah bersama BKK SMK dan dunia kerja dalam rangka mempromosikan taut suai pembelajaran di SMK dan keterserapan lulusan SMK.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Pelaksanaan BKK di SMK

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. <https://bkk.ditpsmk.net/>





Seluruh kegiatan dan anggaran dimasukkan dalam ke dalam format RKA SKPD dalam aplikasi SIPD

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah	Target Daerah	
					2022	2023		2022	2023
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%		100	76.28	84.78	85.12
Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah				Catatan Daerah	Catatan K/L	Catatan Bangsa	Catatan Bappenas	Kesepakatan Pembahasan	Kesepakatan Rencana Target Daerah



Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target	Satuan	Pagu
1.01.02.1.03.02- Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6	ruang	1.277.304.000,00

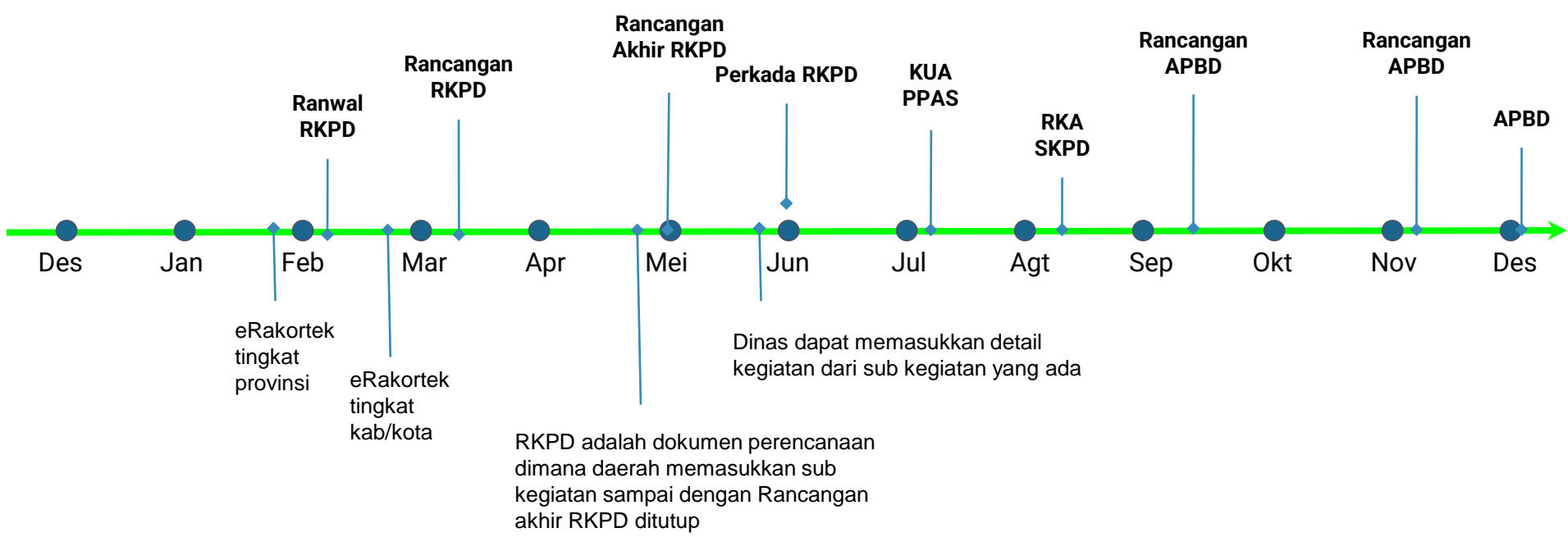


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

# Perencanaan Berbasis Data Tingkat Kabupaten/Kota



# Jadwal perencanaan pemerintah daerah dimulai dari perencanaan pembangunan daerah sampai disahkannya APBD



# Tahapan Perencanaan Berbasis Data di Pemerintah Daerah

- Tahapan Perencanaan berbasis data di pemerintah daerah tidak menggunakan lembar kerja seperti yang ada di satuan pendidikan, namun menggunakan tahapan yang ada di dalam sistem informasi perencanaan daerah (SIPD)
- Dokumen yang harus diisi oleh daerah dalam SIPD terdiri dari:
- Dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Dokumen Anggaran berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- Seiring dengan telah terbitnya Permendagri No 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimum, maka perencanaan daerah akan difokuskan pada program dan kegiatan untuk pencapaian indikator di dalam SPM
- Oleh karena itu, materi perencanaan berbasis data ini akan membuat contoh yang preskriptif terkait dengan proses Identifikasi - Refleksi - Benahi untuk perencanaan daerah. Contoh preskriptif ini akan menjadi acuan pemenuhan minimal bagi daerah, yang berarti bahwa dalam membuat perencanaan program dan kegiatan perlu memprioritaskan panduan ini sebelum mempunyai kegiatan yang lain

## Lembar Kerja 1b: Terdapat 9 indikator kinerja urusan pendidikan untuk Kabupaten/Kota sebagai Standar Pelayanan Minimal yang harus diprioritaskan

Kelompok Indikator		Indikator Kinerja Urusan Kab/Kota
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	1. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS) 2. Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
2	Kualitas Hasil Belajar	3. Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 4. Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 5. Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 6. Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
3	PAUD	7. Jumlah Satuan Paud yg mendapatkan min. akreditasi B 8. Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV 9. Rasio pengawas dan penilik PAUD

## Pemenuhan Minimal

### Perumusan identifikasi, refleksi dan benahi untuk indikator SPM

1. Perumusan berikut dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai referensi pemenuhan minimal dalam memilih masalah, merumuskan akar masalah dan menetapkan kegiatan yang akan dilakukan. Pemerintah daerah memprioritaskan perumusan minimal ini untuk dipilih dalam perencanaan daerah.
2. Jika suatu daerah pemenuhan SPM nya sudah tercapai dan mempunyai kemampuan keuangan lebih, maka dapat menambahkan kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah di luar yang ditetapkan dalam pemenuhan minimal ini

## Mengapa APS belum 100%?

Ada berapa jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah?



Ada berapa jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah?



Apakah jumlah ruang kelas dan/atau sekolah sudah mencukupi?



Apakah anak usia tertentu tersebut tidak bersekolah karena terkendala biaya?

# Pemenuhan minimal Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai target	Berapa jumlah anak usia 7- 15 tahun yang tidak bersekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah
	Jumlah kelas/sekolah kurang dibandingkan jumlah anak usia sekolah	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, terutama di wilayah 3T
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	
	Peserta didik terkendala biaya operasional	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

## Pendataan warga negara usia 7-15 tahun yang tidak bersekolah

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memastikan semua anak usia 7-15 untuk bersekolah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengetahui jumlah anak usia usia 7-15 yang tidak bersekolah di daerahnya.

Data yang dibutuhkan adalah:

Karakteristik demografis (nama, alamat, dll)  
Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial, bekerja, menikah, tidak termotivasi)

Data yang detail terkait karakteristik anak dan latar belakang penting sebagai dasar untuk merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Data BPS

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://www.bps.go.id/indicator/28/301/1/angka-partisipasi-sekolah-a-p-s-.html>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

## Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memastikan penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota perlu mengetahui jumlah layanan pendidikan yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T di daerahnya dan jenis layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik wilayah 3 T tersebut.

Data yang dibutuhkan adalah:

Karakteristik demografis (jenis wilayah, aksesibilitas, ketersediaan listrik dan internet)

Jumlah satuan pendidikan yang tersedia (per jenjang, per wilayah, jarak antar satuan pendidikan).



### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Perubahannya
2. Permendikbud No. 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional
3. Permendikbud No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=249](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=249)
2. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2194](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2194)
3. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2407](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2407)
4. [https://jdih.kemdikbud.go.id/detail\\_peraturan?main=2413](https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2413)

# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat Kabupaten/Kota Jenjang SD dan SMP

## Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T

### Deskripsi kegiatan

Upaya memenuhi target APS tersebut dapat dilakukan dalam 3 hal:

#### 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan melalui penambahan ruang kelas baru (RKB) & rehabilitasi Ruang Kelas sehingga dapat digunakan kembali

- A. Menghitung jumlah RKB yang diperlukan secara agregat. Dengan cara APS usia 7 - 15 = jumlah siswa usia 7 - 15 bersekolah : jumlah penduduk usia 7 - 15. Dengan asumsi 1 RKB bisa menampung 32 siswa untuk SMP dan 28 siswa untuk SD dan dengan target APS tertentu (selisih target APS dengan riil APS), kebutuhan RKB dapat dihitung dengan membagi selisih jumlah siswa bersekolah hasil target dikurangi kondisi riil.
- B. Melakukan pemetaan mikro (di level sekolah) sekolah mana sajakah yang paling memerlukan penambahan RKB;
- C. Mengusulkan sekolah-sekolah tersebut untuk mendapatkan RKB melalui program DAK Fisik;
- D. Mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan RKB

- E. mengidentifikasi sekolah-sekolah yang Ruang kelasnya mengalami kerusakan;
- F. Mengusulkan rehabilitasi Ruang Kelas melalui program DAK Fisik.
- G. Mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan rehabilitasi ruang kelas

#### 2. Mengembalikan anak tidak sekolah (ATS) ke pendidikan formal / non formal

- A. Melakukan pendataan secara berjenjang dari level Kab/Kota, Kecamatan, & Kelurahan;
- B. Mendata identitas individu (ATS);
- C. Menyediakan alternatif layanan pendidikan formal & informal;
- D. karena alasan fleksibilitas waktu untuk bekerja, ATS mungkin lebih memilih pendidikan non formal & untuk meningkatkan keterampilan bekerja
- E. Bekerjasama dengan OPD lain atau Babinsa/Babinkamtibas dalam mengadvokasi ATS untuk kembali ke sekolah
- F. Melibatkan Pemerintah Desa untuk mengadvokasi ATS untuk kembali ke sekolah



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat Kabupaten/Kota Jenjang SD dan SMP

## Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung/wilayah 3T

### Deskripsi kegiatan

#### 3. Mencegah siswa putus sekolah

- A. Memfasilitasi & mengadvokasi sekolah untuk melakukan pencegahan siswa putus sekolah;
- B. Strategi pencegahan dini siswa putus sekolah dapat dilakukan dengan mengidentifikasi siswa yang rentan putus sekolah (banyak absen, berperilaku indisipliner, perkembangan belajar terganggu);
- C. Melakukan pendampingan secara intensif & per individu siswa rentan putus sekolah sehingga dapat menyelesaikan pendidikan.
- D. Melakukan advokasi kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak
- E. Melibatkan Pemerintah Desa untuk membuat regulasi tentang wajib belajar 12 tahun
- F. Mengalokasikan BOSDA atau beasiswa bagi peserta didik yang rentan secara ekonomi dalam APBD

### Rujukan dokumen program / kegiatan

- 1. Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Perubahannya
- 2. Buku Pendidikan bagi komunitas Adat
- 3. Buku Pendidikan bagi anak daerah 3T

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

- 1. <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/>
- 2. <https://www.youtube.com/watch?v=en9VmckViTs>
- 3. <https://www.youtube.com/watch?v=EhDOyER3R5k>
- 4. [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20Komunitas%20Adat%20\(1\).pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20Komunitas%20Adat%20(1).pdf)
- 5. [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20Daerah%203T%20\(1\).pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20Daerah%203T%20(1).pdf)



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

**Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus**

<p><b>Deskripsi kegiatan</b></p> <p>Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin pembiayaan pendidikan kepada Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus di daerahnya.</p> <p>Data yang dibutuhkan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Data Peserta Didik dan Peserta Didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu.</li><li>2. Alasan tidak sekolah (ekonomi, sosial, bekerja, menikah, tidak termotivasi).</li></ol> <p>Upaya yang dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengalokasikan BOSDA untuk biaya non personel dalam APBD</li><li>2. Mengalokasikan beasiswa bagi peserta kurang mampu dalam APBD</li></ol>	<p><b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b></p> <p><b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b></p>
--	---



## Mengapa kompetensi literasi dan numerasi masih rendah?



**Apakah jumlah pendidik dan tenaga kependidikan sudah terpenuhi?**



**Apakah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan sudah merata?**



**Apakah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sudah baik?**



**Apakah kualitas proses pembelajaran sudah baik?**



**Apakah sekolah sudah kondusif untuk melakukan pembelajaran?**



**Apakah tersedia perlengkapan pembelajaran ?**

# Pemenuhan minimal Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Kemampuan literasi dan numerasi rendah	Data jumlah dan distribusi PTK belum ada	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	Pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan
	Jumlah PT tidak merata	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
	Jumlah PTK tidak mencukupi	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	Pengajuan formasi guru ASN (PPPK)
			Penyediaan guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
	Kualitas PTK dan/atau kualitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak
	Kualitas iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan masih rendah		Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi



# Pemenuhan minimal Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Kompetensi literasi dan numerasi rendah	Kualitas PTK dan/atau kualitas proses pembelajaran perlu ditingkatkan	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
			Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
			Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Membentuk komunitas belajar dan memastikan tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	Perlengkapan pembelajaran belum mencukupi	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Pengadaan buku teks dan non teks
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

**Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota dapat melakukan penataan untuk memastikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) terdistribusi secara merata. Untuk melakukan penataan, langkah yang dapat dilakukan:

1. Memiliki data jumlah PTK yang terdata di Dapodik dan memastikan seluruh PTK terdata dengan benar di Dapodik
2. Memiliki peta kelebihan dan kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Dapodik pada setiap satuan Pendidikan.
3. Melakukan distribusi dari satuan pendidikan yang memiliki kelebihan PTK ke satuan pendidikan yang kekurangan PTK

## Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Dapodik
2. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

## Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota perlu memiliki peta kebutuhan Pengawas Sekolah. Langkah yang dapat dilakukan:

1. Memiliki data satuan pendidikan yang berada dalam kewenangan
2. Memiliki data jumlah Pengawas dan memastikan seluruh pengawas terdaftar di SIMTendik
3. Membuat peta kebutuhan Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan binaan

### Rujukan dokumen program / kegiatan

PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

## Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota perlu melakukan distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berkualitas agar tidak menumpuk pada satu satuan pendidikan. Untuk melakukan distribusi, langkah yang dapat dilakukan:

1. Memiliki data jumlah PTK beserta status kualifikasi dan sertifikat pendidik yang terdata di Dapodik.
2. Melakukan distribusi PTK berkualitas dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan PTK berkualitas

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Dapodik

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

## Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota dapat mengajukan formasi untuk mengisi kekurangan Guru ASN baik yang diakibatkan oleh pensiun ataupun lainnya, dengan langkah sebagai berikut:

1. Memiliki peta kelebihan dan kekurangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Dapodik pada setiap satuan Pendidikan.
2. Mengajukan formasi Guru ASN melalui aplikasi E-Formasi KemenPANRB disertai dengan SPTJM Kepala Daerah

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Dapodik
2. E-Formasi KemenPANRB

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

**Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab menyediakan minimal 1 (satu) orang Guru Pembimbing Khusus pada Satuan Pendidikan Inklusif. Langkah yang dapat dilakukan adalah **melaksanakan Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus**

## Rujukan dokumen program / kegiatan

Pedoman Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://gpk.gtk.kemdikbud.go.id>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

## Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### Deskripsi kegiatan

Kemendikbud ristek telah menyiapkan program percepatan karir guru menjadi kepala sekolah melalui Program Guru Penggerak dan penerbitan Permenbudikbudristek nomor 40 tahun 2021.

Kebijakan percepatan guru penggerak menjadi penawas juga sedang dirancang.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

- 1.Dokumen Salinan:  
[https://bit.ly/Dokumen\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/Dokumen_Permendikbudristek40_2021)
- 2.Surat Edaran (SE):  
[https://bit.ly/SE\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/SE_Permendikbudristek40_2021)

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

- 1.Booklet: [https://bit.ly/Booklet\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/Booklet_Permendikbudristek40_2021)
- 2.Paparan Sosialisasi:  
[https://bit.ly/Paparan\\_Permendikbudristek40\\_2021](https://bit.ly/Paparan_Permendikbudristek40_2021)
- 3.Video Dukungan Pemda:  
[https://bit.ly/VideoDukunganPemda\\_PGP](https://bit.ly/VideoDukunganPemda_PGP)
- 4.FAQ:  
<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/fag>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

## Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab memfasilitasi sekolah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang menuju bebas perundungan dan perilaku kekerasan. Alternatif aktivitas yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

1. Mengidentifikasi sekolah yang relatif besar terjadinya tindak perundungan dan kekerasan;
2. Melakukan pendampingan pada sekolah point 1 tersebut di atas, dapat dilakukan dengan mengacu pada program roots
3. Melakukan kampanye anti perundungan untuk sekolah secara keseluruhan agar tercipta kesadaran tentang pentingnya pencegahan tindak kekerasan.
4. Mengoptiimalkan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Roots Program <https://rootsindonesia.id/>

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

**Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah daerah dapat melakukan:

1. Sosialisasi kepada sekolah tentang apa yang dimaksud dengan perilaku radikalisme & intoleransi
2. Sosialisasi kepada sekolah tentang jenis-jenis perilaku radikalisme & intoleransi yang mungkin saja terjadi di sekolah
3. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan perilaku radikalisme & intoleransi yang bisa saja terjadi di sekolah
4. Hasil yang bisa diwujudkan adalah penanaman perilaku saling menghormati perbedaan agama, suku, bangsa, pemikiran, ide yang mencerminkan profile pelajar Pancasila yaitu berkebhinekaan global

## Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Definisi & Pemahaman Perilaku Radikalisme & Intoleransi
2. Strategi Sekolah Mencegah Radikalisme & Intoleransi

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. <https://www.youtube.com/watch?v=0m8JCMVkJAI>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=ymYiofzGi4M&t=104s>





# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

**Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab terhadap peningkatan kualifikasi dan kompetensi PTK di wilayahnya. Langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong PTK untuk memiliki kualifikasi minimal S-1/D-IV
2. Mempersiapkan PTK mengikuti pre-test dan Uji Kompetensi program sertifikasi

## Rujukan dokumen program / kegiatan

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

**Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak**

### Deskripsi kegiatan

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru.

Pemerintah Provinsi dapat mendorong Guru atau Kepala Sekolah untuk mengikuti Program Guru Penggerak.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Merdeka Belajar 5 Program Guru Penggerak

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD dan SMP

## Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru

<u>Opsi program/kegiatan yang dapat dipilih:</u>	<u>Keterangan tambahan</u>
<b>1.Merdeka Belajar 7 (PSP)</b> utk kegiatan sesuai lampiran Perjanjian Kerja Sama (PSP angkatan 1) atau Nota Kesepakatan (PSP angkatan 2 dan angkatan 3) dan atau;	a.Penguatan Pokja Manajemen Operasional (PMO) b.Bimtek penguatan komite pembelajaran c.Dll
<b>2.IKM atau Merdeka Belajar 15 (Kurikulum Merdeka &amp; Platform Merdeka Mengajar) dan atau;</b>	a.Bimtek Kurikulum Merdeka b.Bimtek/seminar/lokakarya Platform Merdeka Mengajar c.dll
<b>3.Merdeka Belajar 19 (Platform Rapor Pendidikan) dan atau;</b>	a.Bimtek Perencanaan Berbasis Data b.Bimtek platform rapor pendidikan c.dll
<b>4.Merdeka Belajar lainnya</b>	

### Rujukan dokumen program / kegiatan:

- 1.Laman PSP: <https://bit.ly/LamanPSP>
- 2.Laman kurikulum: <https://bit.ly/LamanKurikulum>
- 3.Laman PBD:



## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

**Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut**

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota dapat membentuk dan menetapkan komunitas belajar antara lain:

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
2. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan
3. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKPS)

serta memastikan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah aktif dalam kelompok kerja.

Rujukan dokumen program / kegiatan

Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

**Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan**

## Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota dapat memfasilitasi pertemuan di MGMP, MKKS, dan MKPS secara berkala dan memberikan insentif agar pertemuan di komunitas dapat terus terselenggara dengan baik

## Rujukan dokumen program / kegiatan

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

**Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan**

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Kab/Kota dapat mendorong PTK mengikuti program beasiswa pendidikan indonesia.

Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan agar PTK dapat memiliki kualifikasi minimal S-1/D-IV serta dapat mengikuti program sertifikasi.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://beasiswa.kemdikbud.go.id/>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

## Pelatihan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan

### Deskripsi kegiatan

1. Pemerintah Kab/Kota dapat mendorong Guru mengikuti program Pembelajaran Berbasis TIK (PembaTIK) dan atau; mengikuti Bimtek/seminar/lokakarya Platform Merdeka Mengajar
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran baik secara luring maupun daring (Webinar)

### Rujukan dokumen program / kegiatan

#### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

1. <https://simpatik.belajar.kemdikbud.go.id/>
2. <https://guru.kemdikbud.go.id/>
3. Akun Pembelajaran untuk Digitalisasi Sekolah  
<https://youtu.be/YlevuaRLhR8>
4. Pemanfaatan TIK di Sekolah dalam Rangka Digitalisasi Pendidikan Era Merdeka Belajar  
<https://youtu.be/BceY37AEUdE>
5. Asyiknya Belajar dan bermain Coding untuk Anak-Anak  
<https://youtu.be/y1TmEU06tGo>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

## Pengadaan buku teks dan non teks

### Deskripsi kegiatan

Dinas pendidikan dapat memfasilitasi pengadaan buku teks dan non teks melalui e-Katalog LKPP.

Selain itu, dinas pendidikan juga dapat mendukung sekolah-sekolah yang akan menjalin kerja sama dengan perusahaan (CSR) dalam hal pengadaan buku-buku yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Dinas Pendidikan dapat mendorong sekolah untuk memanfaatkan buku elektronik dari Kemendikbudristek yang tersedia di laman Kemendikbudristek

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Pengadaan Buku melalui e-Katalog LKPP

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://buku.kemdikbud.go.id/>





# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Kabupaten Kota jenjang SD,SMP

## Pengadaan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan

<p>Deskripsi kegiatan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Pendidikan melakukan pendataan sekolah yang sudah memiliki peralatan TIK</li><li>2. Sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TIK dapat diusulkan untuk menerima DAK Fisik</li><li>3. Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana dalam APBD untuk pengadaan TIK bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki peralatan TIK</li></ol>	Rujukan dokumen program / kegiatan
	Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



## Indikator kinerja urusan: Akses (Angka Partisipasi Sekolah) PAUD

### Mengapa APS belum 100%?

Ada berapa jumlah anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah?



Ada berapa jumlah desa belum memiliki PAUD?



Apakah masyarakat di desa/kelurahan sudah memahami pentingnya PAUD?



Berapa banyak anak yang ingin mengikuti PAUD tetapi berasal dari keluarga miskin?

# Indikator kinerja urusan: layanan Pendidikan Anak Usia Dini

**Mengapa guru PAUD S1/D-IV masih rendah?**



**Apakah minat pengembangan karir guru PAUD rendah?**

**Mengapa rasio pengawas/penilik PAUD masih rendah?**



**Apakah jumlah dan distribusi pengawas/penilik sudah tercukupi dan merata?**

**Mengapa jumlah satuan PAUD minimal akreditasi B masih rendah?**



**Apakah satuan PAUD sudah mengerti tentang kualitas layanan PAUD?**



**Apakah kondisi kualitas lingkungan belajar satuan PAUD dalam kondisi baik?**



**Apakah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sudah baik?**

# Pemenuhan minimal Kabupaten Kota - Layanan PAUD

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Jumlah Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS 5-6 tahun)	Data anak usia dini yang belum bersekolah belum tersedia	Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
	Jumlah layanan PAUD belum memadai	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
	Jumlah anak PAUD dari keluarga miskin yang terkendala biaya	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung, terutama di wilayah 3T
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan
Tingkat Pertumbuhan Guru PAUD S1 dan D-IV	Jumlah guru PAUD S1 dan D-IV kurang	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	Rasio pengawas dan penilik PAUD kurang memadai	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah



# Pemenuhan minimal Kabupaten Kota - Layanan PAUD

Identifikasi (Masalah)	Refleksi (Akar Masalah)	Benahi (Nomenklatur Sub Kegiatan)	Benahi (Deskripsi Kegiatan)
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Satuan PAUD belum mengerti kualitas layanan PAUD	Sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan	Sosialisasi kepada satuan pendidikan paling sedikit mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi pentingnya proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas, yang dilakukan
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini
	Kualitas PTK masih rendah	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak
			Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru
			Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas/penilik sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
	Kualitas lingkungan belajar PAUD dalam kondisi belum memadai	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak
		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD

## Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun

### Deskripsi kegiatan

Kegiatan diperlukan untuk melakukan pendataan anak usia dini dalam rangka identifikasi kebutuhan daya tampung layanan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, terutama di tingkat desa. Dinas Pendidikan bisa mengakses data-data yang dibutuhkan dari berbagai sumber.

Dengan menggunakan data-data yang tersedia, Pemda dapat memetakan kebutuhan daya tampung dan mengalokasikan sumber dayanya untuk memprioritaskan akses layanan bagi anak usia 5-6 tahun yang berasal dari keluarga miskin.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. data Dukcapil tentang anak usia 5-6 tahun;
2. data Dapodik tentang anak usia 5-6 tahun yang bersekolah;
3. data DPMD tentang anak usia 5-6 tahun yang ada di desa (pendataan berbasis desa); dan
4. data Dinas Sosial/Bappeda bidang sosial tentang anak usia 5-6 tahun yang berasal dari keluarga miskin.

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD

**Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa dan di wilayah yang kekurangan daya tampung/di wilayah 3T**

## Deskripsi kegiatan

### 1. Peningkatan Akses melalui Pendekatan Nonfisik

Apabila di desa sudah ada layanan PAUD, tetapi APS 5-6 tahun belum memenuhi 100%, maka Pemda perlu meningkatkan partisipasi dengan cara sosialisasi dan dukungan biaya (melalui subkegiatan lain), serta mendorong partisipasi anak usia mendekati 7 tahun untuk berpartisipasi di pendidikan dasar (SD/MI/pesantren).

### 1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

- Apabila di desa sudah ada layanan PAUD, tetapi APS 5-6 tahun belum memenuhi 100%, maka Pemda perlu meningkatkan daya tampung dengan cara mengoptimalkan ruang yang sudah tersedia atau membangun ruang baru.
- Pembangunan satuan PAUD baru diprioritaskan **hanya** bagi desa yang belum ada PAUD sebelumnya.

## Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Data SIMDES
2. Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD – *baru akan siap di Juni 2022*

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD

**Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa dan di wilayah yang kekurangan daya tampung/di wilayah 3T – 2/3**

## Deskripsi kegiatan

### 3. Pembangunan sarana dan prasarana esensial

Ketersediaan sarana prasarana esensial diperlukan untuk mendukung kualitas layanan pembelajaran dan pengelolaan, meliputi:

- ketersediaan lahan;
- ketersediaan bangunan (yang utama adalah kondisi bangunan dalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan peserta didik dan PTK, bukan luas bangunan);
- ketersediaan tempat bermain/belajar;
- ketersediaan jaringan listrik (tidak harus kepemilikan jaringan listrik, tetapi yang utama adalah ketersambungan unit dengan jaringan listrik sehingga satuan dapat menggunakan fasilitasnya);
- ketersediaan fasilitas sanitasi (utamanya instalasi air, jamban/toilet dengan air bersih, dan instalasi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir);
- ketersediaan APE (dapat mengambil dari bahan alam/objek sekitar);
- ketersediaan buku bacaan anak;
- ketersediaan perangkat TIK.

*Catatan:* Pemenuhan sarana dan prasarana esensial PAUD diserahkan kepada kebijakan daerah, menyesuaikan kesiapan dan kesanggupan daerah serta konteks dan karakteristik daerah.

## Rujukan dokumen program / kegiatan

- Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas : Sarana Prasarana Esensial (seri 8) – baru *akan tersedia Juni 2022*
- Kriteria Minimum Penyelenggaraan PAUD untuk dinas - *baru akan tersedia Juni 2022*

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi





# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD

**Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa dan di wilayah yang kekurangan daya tampung/di wilayah 3T – 3/3**

<b>Deskripsi kegiatan</b>  <b>4. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD</b>  Pemda perlu mempersiapkan PTK sebelum melaksanakan pembangunan satuan PAUD baru di desa.  <i>Kegiatan ini dilakukan jika terdapat pembangunan PAUD di desa atau wilayah yang sebelumnya tidak memiliki layanan PAUD. Setiap unit PAUD baru harus memiliki PTK.</i>	<b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b>  Pedoman Peran Desa dalam Penyelenggaraan PAUD – <i>baru akan tersedia di Juni 2022</i>  Pedoman rekrutmen guru di desa (Ditjen GTK) - <i>baru akan tersedia Juli 2022</i>
	<b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD

**Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan**

<p><b>Deskripsi kegiatan</b></p> <p>Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik kurang mampu, seperti SPP, transportasi, atau kebutuhan pendukung lainnya. Jenis kebutuhan dan mekanisme pemenuhan ditentukan sesuai kebijakan daerah (kebutuhan berupa menu). Misalnya, tidak semua satuan PAUD mensyaratkan SPP (terutama satuan yang berstatus Negeri) sehingga SPP tidak bersifat <i>mandatory</i>, maka Pemda bisa mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan lainnya.</p>	<p><b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b></p> <p>NSPK Panduan Implementasi Pemenuhan SPM PAUD</p> <p><b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b></p>
---	---



## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Pertumbuhan Guru PAUD S1 dan D-IV

**Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan**

### **Deskripsi kegiatan**

Pemerintah Daerah dapat mendorong PTK mengikuti program beasiswa pendidikan indonesia.  
Pemerintah Daerah juga dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan agar PTK dapat memiliki kualifikasi minimal S-1/D-IV serta dapat mengikuti program sertifikasi.

### **Rujukan dokumen program / kegiatan**

**Tautan untuk mengakses dokumen / informasi**  
<https://beasiswa.kemdikbud.go.id/>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Rasio Pengawas dan Penilik PAUD

## Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Daerah perlu memiliki peta kebutuhan Pengawas Sekolah maupun Penilik. Langkah yang dapat dilakukan:

1. Memiliki data satuan pendidikan yang berada dalam kewenangan
2. Memiliki data jumlah Pengawas dan Penilik
3. Membuat peta kebutuhan Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan binaan sesuai PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
4. Membuat peta kebutuhan penilik terhadap satuan pendidikan non formal binaan

### Rujukan dokumen program / kegiatan

PermenPANRB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk peningkatan Rasio Pengawas dan Penilik PAUD

**Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah**

### Deskripsi kegiatan

Pemerintah Daerah mengangkat Pengawas Sekolah yang sudah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) Pengawas Sekolah atau sertifikat program Guru Penggerak dengan berpedoman pada PermenPANRB No. 21 Tahun 2010

### Rujukan dokumen program / kegiatan

PermenPANRB No. 21 Tahun 2010

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

**Sosialisasi kepada satuan pendidikan paling sedikit mengenai kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang meliputi pentingnya proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas**

### Deskripsi kegiatan

Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur kualitas layanan PAUD, maka satuan PAUD perlu mengetahui pentingnya proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas.

Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang layanan yang berkualitas, yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Pedoman Penjaminan Mutu PAUD - *akan tersedia di Juni 2022*
2. Pedoman Penyelenggaraan Layanan PAUD - *akan tersedia di Juli 2022*

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

## Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini

### Deskripsi kegiatan

Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur kualitas layanan PAUD, maka satuan PAUD perlu memperkuat proses pembelajaran dan pengelolaan yang berkualitas.

Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan bagi satuan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengawas/penilik atau unsur daerah lain yang memiliki kompetensi.

#### *Catatan:*

Kuota akreditasi per tahun ditentukan oleh BAN PAUD-PNF, karenanya perlu pendekatan khusus untuk merealisasikan pemenuhan indikator ini. Selain menilai satuan yang belum terakreditasi, kerangka kebijakan dari BAN PAUD-PNF juga harus memberi peluang re-akreditasi. Maka, Pemda mengidentifikasi satuan PAUD yang belum diakreditasi dan yang belum mencapai akreditasi B, sebagai satuan yang akan diberikan pendampingan.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

1. Pedoman Penjaminan Mutu PAUD - *akan tersedia di Juni 2022*
2. Pedoman Penyelenggaraan Layanan PAUD - *akan tersedia di Juli 2022*

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

## Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan

<b>Deskripsi kegiatan</b>  Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur proses pembelajaran satuan, maka PTK harus memiliki kompetensi yang memadai.  Pemda memiliki data dan pemetaan PTK yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Selanjutnya, Pemda mendorong PTK tersebut untuk mengikuti diklat berjenjang.	<b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b>  Diklat berjenjang tingkat dasar
	<b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b>  <a href="https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seri-paud-diklat-berjenjang-dasar/">https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seri-paud-diklat-berjenjang-dasar/</a>





## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

**Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak**

### Deskripsi kegiatan

Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur proses pembelajaran satuan, maka PTK harus memiliki kompetensi yang memadai.

Program Guru Penggerak bertujuan untuk melatih PTK sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang peserta didik secara holistik, serta proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.

Dengan demikian, Pemda mengidentifikasi kepala satuan dan guru/pendidik yang belum memiliki sertifikat Guru Penggerak. Selanjutnya, Pemda memfasilitasi kepala satuan dan guru/pendidik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Guru Penggerak.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Program Guru penggerak dan Lini Masa

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

## Fasilitasi pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru

### Deskripsi kegiatan

Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur proses pembelajaran satuan, maka PTK harus memiliki kompetensi yang memadai.

1. Pemda menyelenggarakan kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya yang bisa diikuti oleh PTK untuk memperkuat kompetensinya dengan mengundang narasumber-narasumber ahli.
2. Pemda memfasilitasi partisipasi PTK dalam pelatihan/seminar/lokakarya di berbagai platform daring dengan memberikan dukungan berupa biaya kuota internet, biaya berlangganan aplikasi, dan sebagainya.
3. Pemda mengidentifikasi sumber dukungan lain (mitra, sektor swasta, perguruan tinggi, dll.), untuk kemudian mengelola kerja sama dalam mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk penguatan kompetensi PTK.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Diklat teknis seri PAUD berbasis SPMD secara daring

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://ayogurubelajar.kemdikbud.go.id/seri-paud/#diklat-teknis>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

**Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut**

<b>Deskripsi kegiatan</b>  Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur proses pembelajaran satuan, maka PTK harus memiliki kompetensi yang memadai.  Pemda dapat memfasilitasi pembentukan komunitas belajar bagi PTK (guru/pendidik, kepala satuan, dan pengawas/penilik) sebagai wadah belajar dari dan bersama orang lain (pengimbasan).  Untuk memastikan partisipasi aktif PTK dalam komunitas belajar tersebut, Pemda dapat memberikan dukungan, misalnya berupa biaya pulsa dan kuota internet.  Pemda juga perlu memastikan keberlangsungan ekosistem komunitas belajar tersebut, misalnya melalui penguatan anggaran dan pembinaan secara rutin, serta mengedepankan inklusivitas dalam pengelolaan komunitas belajar yang ada.	<b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b>  Panduan Komunitas Belajar dari Ditjen GTK - <i>akan siap di bulan Juni 2022</i>
	<b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b>



## Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

**Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan**

### Deskripsi kegiatan

Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur proses pembelajaran satuan, maka PTK harus memiliki kompetensi yang memadai.

Pemda dapat memfasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk saling bertukar pengetahuan dan praktik baik dalam rangka peningkatan kualitas layanan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Pemda dapat memberikan dukungan berupa biaya transportasi untuk pertemuan luring maupun biaya pulsa dan kuota internet untuk pertemuan daring.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

Panduan Komunitas Belajar dari Ditjen GTK - *akan siap di bulan Juni 2022*

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

**Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan**

## Deskripsi kegiatan

Untuk mendapatkan status akreditasi B, di mana akreditasi mengukur proses pembelajaran satuan, maka PTK harus memiliki kompetensi yang memadai.

Isu biaya menjadi salah satu faktor sulitnya PTK untuk memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, Pemda dapat memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi PTK yang membutuhkan dukungan untuk mengikuti diklat berjenjang.

## Rujukan dokumen program / kegiatan

Program Beasiswa Pendidikan Indonesia.

## Tautan untuk mengakses dokumen / informasi

<https://beasiswa.kemdikbud.go.id/>



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

**Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun**

<p><b>Deskripsi kegiatan</b></p> <p>Keselamatan peserta didik adalah yang utama. Keamanan lingkungan belajar merupakan aspek yang diukur di dalam akreditasi.</p> <p>Selain itu, penerapan perilaku hidup bersih sehat merupakan bagian dari indikator PAUD HI yang juga diukur dalam akreditasi, termasuk peran PAUD dalam pencegahan dan penanganan <i>stunting</i>, sehingga ketersediaan dan kondisi fasilitas sanitasi menjadi prioritas untuk penerapan perilaku tersebut.</p> <p>Dengan demikian, Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan kondisi bangunan serta sarana dan prasarana (utamanya fasilitas sanitasi) satuan PAUD berada dalam kondisi yang baik. Kegiatan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan unit lain yang terkait.</p>	<p><b>Rujukan dokumen program / kegiatan</b></p> <p>Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas: Lingkungan Belajar Aman (seri 6)</p> <p><b>Tautan untuk mengakses dokumen / informasi</b></p>
---	---



# Program / kegiatan yang dapat dipilih pemerintah daerah untuk Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B

## Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak

### Deskripsi kegiatan

Menindaklanjuti kegiatan sebelumnya, yaitu pemeriksaan yang sudah dilakukan pemerintah daerah secara berkala, Dinas Pendidikan melakukan pemeliharaan maupun perbaikan pada bangunan serta sarana dan prasarana satuan PAUD, utamanya yang berada dalam kondisi rusak sedang dan berat, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.

Dalam hal pemeliharaan, hal yang ditekankan adalah menjaga keandalan bangunan beserta sarana prasarana agar berfungsi dengan baik.

Perbaikan dilakukan guna mengganti bagian, komponen, bahan dan/atau prasarana gedung yang rusak sehingga dapat berfungsi kembali.

Kegiatan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan unit lain yang terkait.

Kondisi sarana prasarana perlu dimutakhirkan di dapodik oleh satuan PAUD.

### Rujukan dokumen program / kegiatan

- Panduan Penyelenggaraan PAUD Berkualitas: Lingkungan Belajar Aman (seri 6) - *akan tersedia Juni 2022*
- Juknis bantuan operasional DAK Fisik bidang pendidikan (Permendikbud no 20/2022).

### Tautan untuk mengakses dokumen / informasi



# Seluruh kegiatan dan anggaran d dimasukkan dalam ke dalam format RKA SKPD dalam aplikasi SIPD

No	Urusan	Kinerja Urusan	Indikator Kinerja Urusan	Satuan	Target Nasional		Capaian Daerah	Target Daerah	
					2022	2023		2022	2023
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	%		100	76.28	84.78	85.12
Dukungan Sub Kegiatan Berdasarkan Prioritas Daerah				Catatan Daerah	Catatan K/L	Catatan Bangsa	Catatan Bappenas	Kesepakatan Pembahasan	Kesepakatan Rencana Target Daerah

Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Target	Satuan	Pagu
1.01.02.1.03.02- Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	6	ruang	1.277.304.000,00

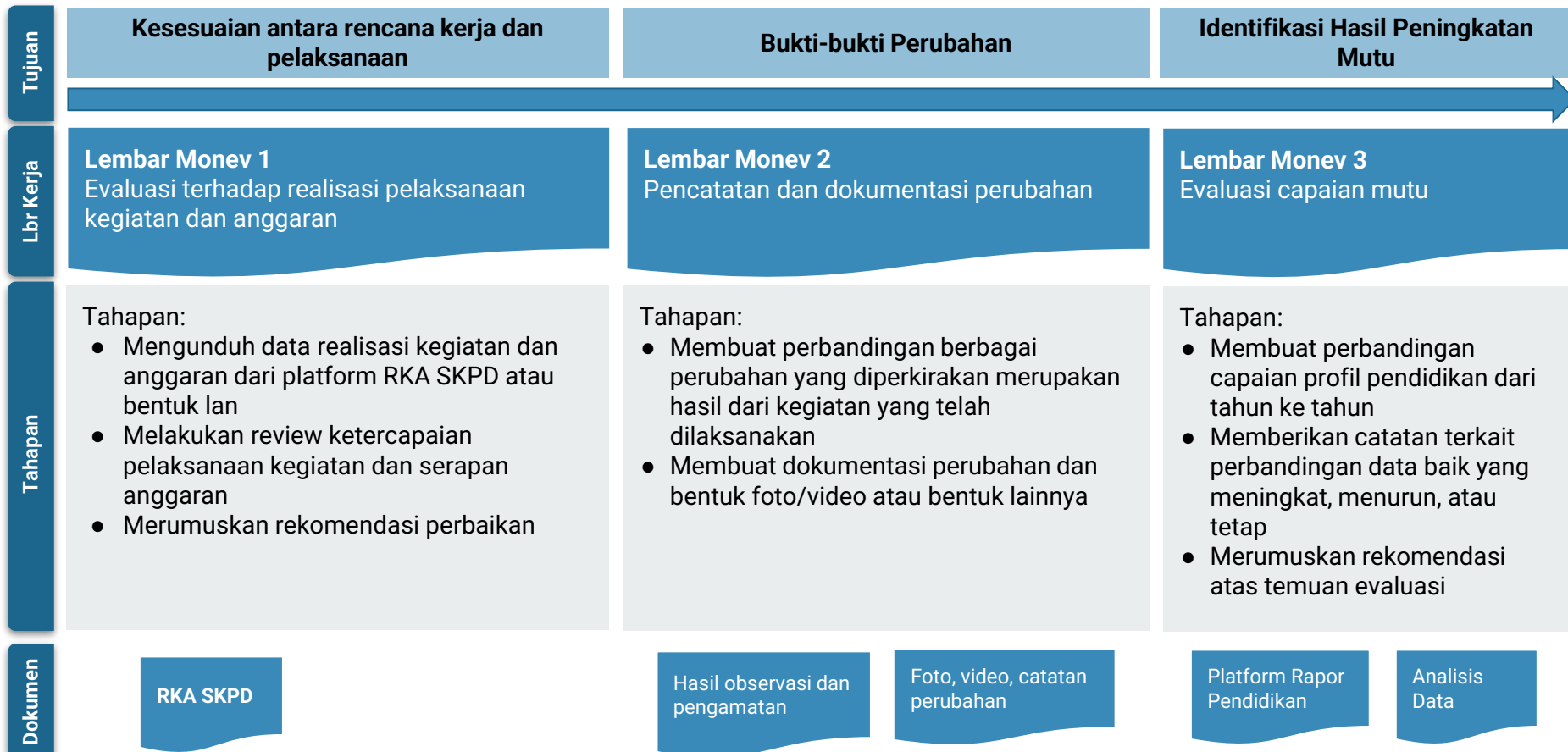


## Bab 4: Monitoring dan Evaluasi

Dalam sesi ini diharapkan peserta dapat:

### 01 Memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

# Bentuk melakukan Monitoring dan Evaluasi




# Money 1: Kegiatan dan pembelanjaan yang telah dilaksanakan di *update* dalam RKA SKPD

Berikut contoh rencana kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan dan distribusi guru

Aktivitas	PIC	Pelaksanaan Kegiatan	Budget	Realisasi	Review Kegiatan	Rekomendasi ke depan
1. Perhitungan dan pemetaan kecukupan guru	Kadis, kabid PTK	12 Feb 2022	50,000,000	40,000,000	Terdapat 1 kota belum didata	Melanjutkan pemetaan
2. Pengajuan formasi guru ASN	Kadis, Kabid PTK	2 Mar 2022	150,000,000	150,000,000	Sesuai rencana	Dilakukan berkala
3. Distribusi guru	Kepala daerah, Kadis	15 Jul 2022	50,000,000	40,000,000	Terdapat 2 orang guru yang belum rotasi	Melanjutkan rotasi



## Monev 2: Pencatatan Perubahan

Sebelum	Sesudah
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelatihan guru masih sedikit jumlahnya</li><li>2. Belum ada program khusus terkait peningkatan literasi dan numerasi di daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah pelatihan guru meningkat drastis terutama terkait literasi, numerasi, dan karakter</li><li>2. Terdapat beberapa program inovatif untuk peningkatan literasi dan numerasi bagi guru.</li></ol>
Unggah dokumentasi:	Unggah dokumentasi: 

## Monev 3: Perbandingan capaian Profil Pendidikan

No	Indikator	2021	2022	Delta	20..
A.1	Kemampuan Literasi	75.0	75.0	-	
A.2	Kemampuan Numerasi	28.0	30.0	+2.0	
A.3	Karakter	27.0	40.0	+13.0	

No	Indikator	2021	2022	Delta	20..
A.1.1	Kemampuan memahami bacaan informasional (non-fiksi)	89.0	89.0	-	
A.1.2	Kemampuan memahami bacaan fiksi	88.0	75.0	-13.0	
A.2.1	Domain bilangan	98.0	98.0	-	
A.2.2	Aljabar	14.0	30.0	+16.0	
A.2.3	Geometri	48.0	60.0	+12.0	
A.2.4	Data dan ketidakpastian	53.0	45.0	-12.0	
A.3.1	Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia	59.0	59.0	-	
A.3.2	Gotong royong	48.0	48.0	-	
A.3.4	Kreativitas	19.0	40.0	+21.0	

Hasil analisis:

1. Peningkatan kemampuan numerasi disebabkan oleh kegiatan tambahan pelajaran.
2. Peningkatan karakter siswa disebabkan beragam kegiatan baru terkait kedisiplinan, kerja tim, dan ruang inovasi yang diberikan lebih luas bagi siswa.



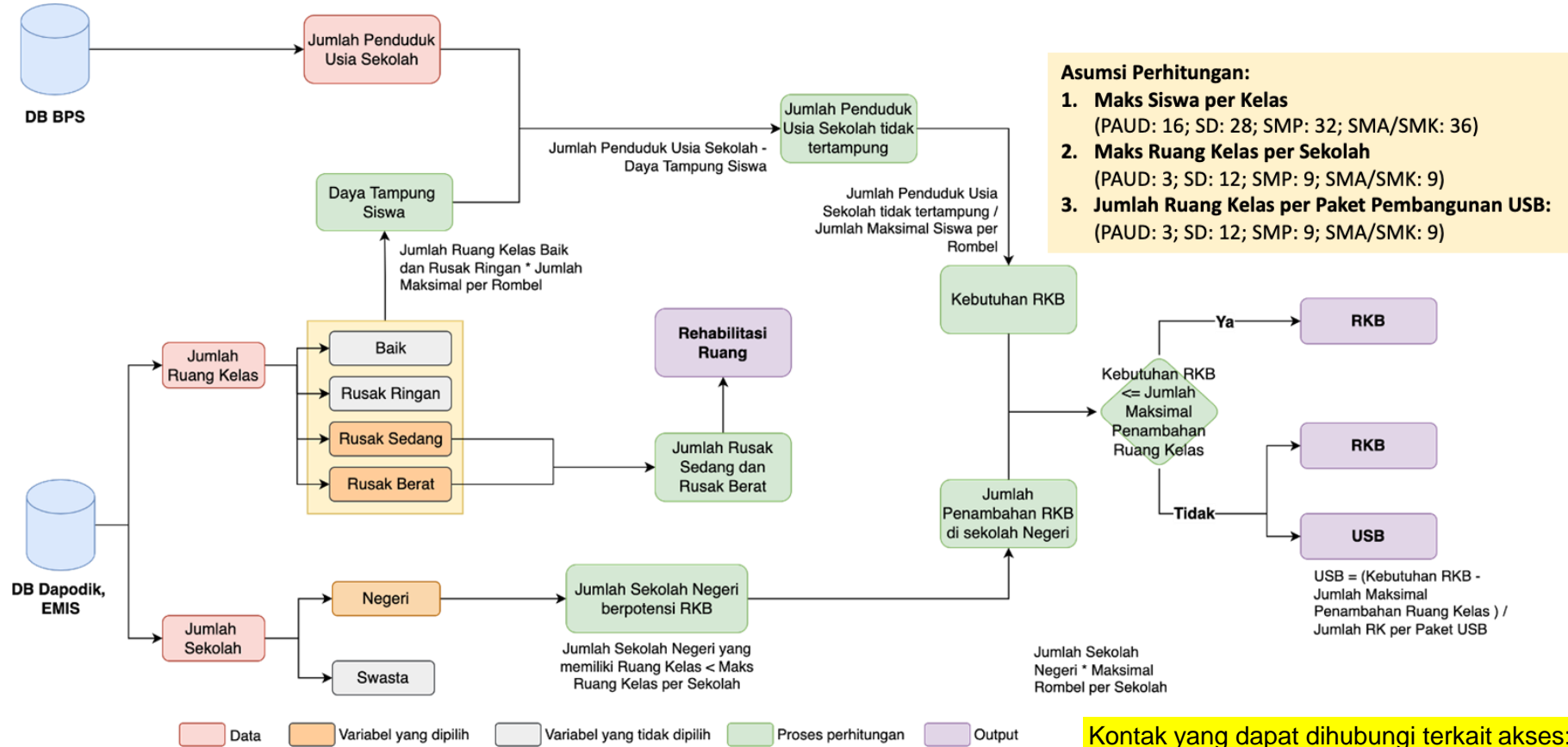


# **TERIMA KASIH**



# **Kerangka perhitungan biaya**

# Perhitungan kebutuhan dalam pemenuhan akses pendidikan

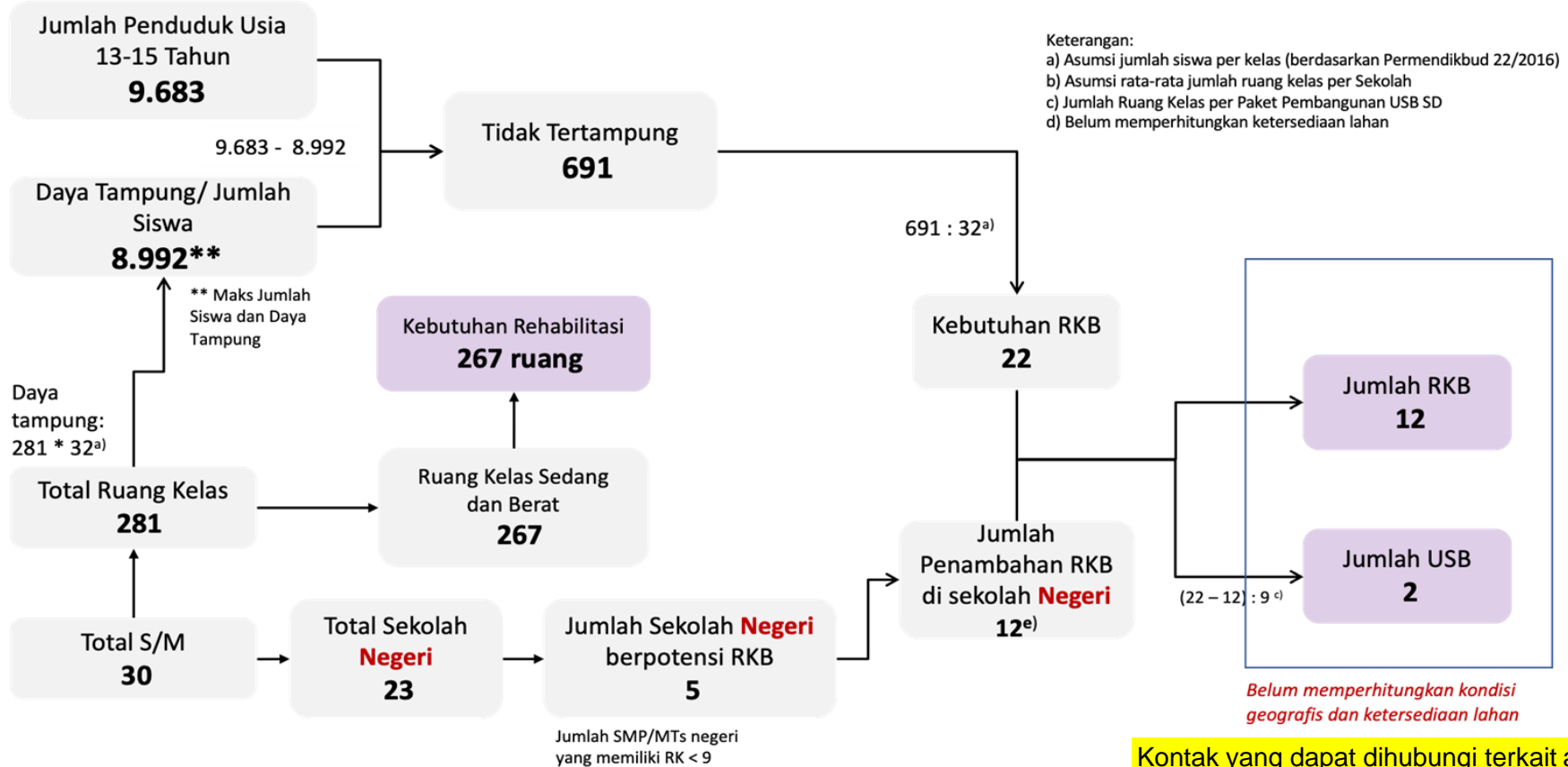


Kontak yang dapat dihubungi terkait akses:  
Nafis Khoirul (0822-2754-6463)





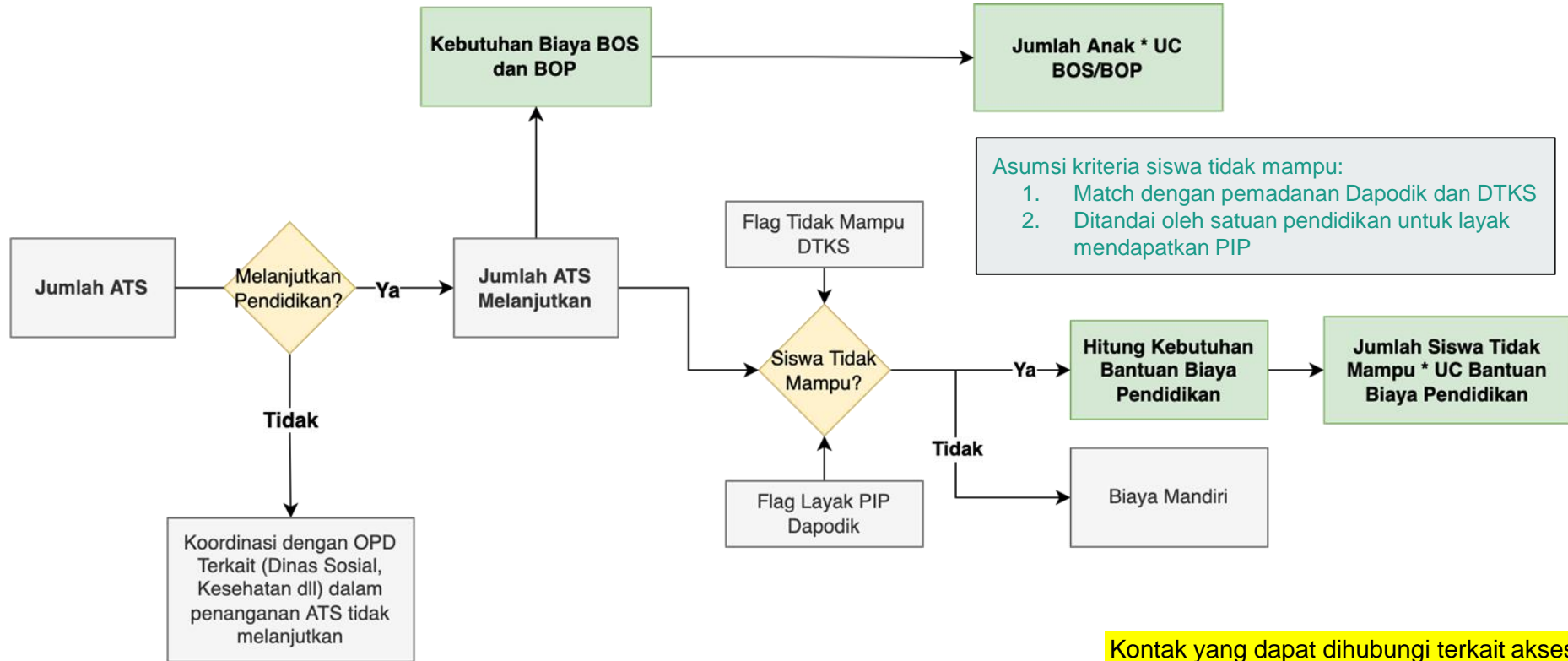
# Contoh perhitungan kebutuhan dalam pemenuhan akses Pendidikan (SMP/MTs)



Kontak yang dapat dihubungi terkait akses:  
Nafis Khoirul (0822-2754-6463)



# Perhitungan biaya pendidikan



Kontak yang dapat dihubungi terkait akses:  
Nafis Khoirul (0822-2754-6463)



# Perhitungan Kebutuhan Guru - Beban Kerja Guru



Kebutuhan Guru  $< 24$  Jam = 1

Sekolah di daerah kondisi khusus  
atau  
Sekolah kondisi khusus

**PP 19/2017 : Guru**

Pasal 13

(1) Pemenuhan paling sedikit 24 jam Tatap Muka per minggu;  
(2) dapat dikecualikan bagi: Guru tidak dapat memenuhi ketentuan minimal 24 (dua puluh empat) jam Tatap Muka per minggu, berdasarkan struktur kurikulum;



- Kebutuhan Guru  $< 24$  Jam = 1
- Kebutuhan Guru (24 Jam + 12 Jam) = 2
- Kebutuhan Guru (24 Jam + 13-48 Jam + 12 Jam) = 2
- Kebutuhan Guru (48 Jam + 13-72 Jam + 12 Jam) = 3

Sekolah kondisi normal

**Permendikbud 15/2018 : Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah**

Pasal 5 (1): Ekuivalensi 12 jam Tatap Muka per minggu bagi guru mata pelajaran

Kontak yang dapat dihubungi terkait guru:  
Dicky (0813-8678-4919)



# Perhitungan Kebutuhan Guru

$$KG = \frac{JTM}{24} = \frac{(MP1 \times \sum K1) + (MP2 \times \sum K2) + (MP3 \times \sum K3)}{24}$$

Keterangan:

KG = kebutuhan guru

JTM = jumlah Jam beban kerja per mata pelajaran per minggu

MP = alokasi jam mata pelajaran per minggu sesuai kurikulum

$\sum K$  = jumlah Kelas/rombongan belajar

40 = wajib mengajar per minggu, digunakan angka 40

1,2,3 = tingkat 1, 2 dan 3

## Ilustrasi Perhitungan Kebutuhan Guru Mapel Matematika

No	Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Kurikulum
1	Pend. Agama	2
2	PKn	2
3	B. Indonesia	4
4	B. Inggris	4
5	Matematika	4
6	IPA	4
7	IPS	4
8	Seni Budaya	2
9	PJOK	2
10	Keterampilan TIK	2
11	Muatan Lokal	2
12	Bimbingan Karir	150-250 org

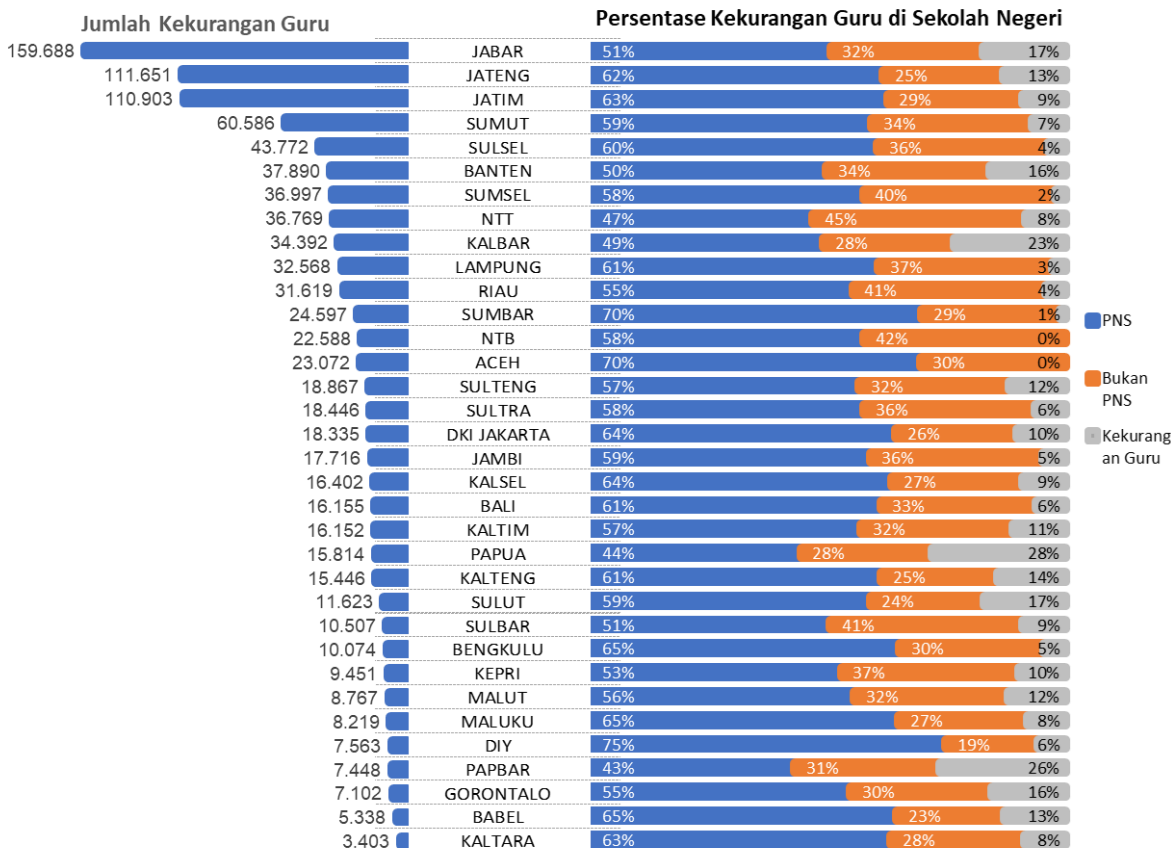
Kelas	Jumlah Rombel
Kelas VII	6
Kelas VIII	6
Kelas IX	6

$$\text{Kebutuhan Guru} = \frac{(4 \times 6) + (4 \times 6) + (4 \times 6)}{24} = 3$$

Kontak yang dapat dihubungi terkait guru:  
Dicky (0813-8678-4919)



# Kebutuhan Guru di Sekolah Negeri



Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru, telah ditetapkan nominal gaji PPPK pada  
Perpres 98/2020 : Gaji dan Tunjangan PPPK.

Target: Seluruh guru yang bertugas di Sekolah Negeri berstatus ASN

Jumlah Kekurangan Guru dan Kebutuhan Alokasi Anggaran:

NO	JENJANG	JUMLAH	ALOKASI GAJI
1	TK	2.767	53.528.998.500
2	SD - SMP	823.383	15.928.755.826.500
3	SLB	4.537	87.770.533.500
4	SMA - SMK	171.929	3.326.052.469.500
<b>TOTAL</b>		<b>1.002.616</b>	<b>19.396.107.828.000</b>

- Alokasi gaji guru ASN PPPK melalui DAU;
- Golongan gaji guru ASN PPPK paling rendah adalah IX dengan masa kerja 0 (nol) tahun (Permenpan-RB 72/2020)

Kontak yang dapat dihubungi terkait guru:  
Dicky (0813-8678-4919)

